EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) KHUSUSNYA NELAYAN ANGGOTA KOPERASI PERIKANAN "MINA JAYA" DI KELURAHAN BANYUANYAR KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh :

FATHAT TORIQA UTAMI

NIM. 0710840033

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) KHUSUSNYA NELAYAN ANGGOTA KOPERASI PERIKANAN "MINA JAYA" DI KELURAHAN BANYUANYAR KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
Di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :
FATHAT TORIQA UTAMI
NIM. 0710840033

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAPORAN SKRIPSI

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) KHUSUSNYA NELAYAN ANGGOTA KOPERASI PERIKANAN "MINA JAYA" DI KELURAHAN BANYUANYAR KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Oleh :
FATHAT TORIQA UTAMI
NIM. 0710840033

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 17 Juli 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
SK Dekan No. : _____
Tanggal : _____

Menyetujui,

Dosen Penguji I	**Dosen Pembimbing I**
Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP	**Dr. Ir. Edi Susilo, MS**
NIP. 19610417 199003 1 001	**NIP. 19591205 198503 1 003**
Tanggal :	**Tanggal :**
Dosen Penguji II	**Dosen Pembimbing II**
Dr. Ir. Agus Tjahjono, MS	**Zainal Abidin, S.Pi, M.BA, MP**
NIP. 19630820 198802 1 001	**NIP. 19770221 200212 1 008**
Tanggal :	**Tanggal :**

Mengetahui,
Ketua Jurusan SEPK

Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP
NIP. 19610417 199003 1 001
Tanggal :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 17 Juli 2014
Mahasiswa

Fathat Toriqa Utami

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RINGKASAN

Fathat Toriqa Utami "Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) khususnya Nelayan Anggota Koperasi Perikanan "Mina Jaya" di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang". Di bawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Zainal Abidin, S.Pi, M.BA, MP**

Penelitian ini bermaksud mengkaji situasi problematik yang dihadapi masyarakat nelayan Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dalam melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Fokus persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah pemberdayaan masyarakat nelayan, terutama Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) melalui Koperasi Perikanan "Mina Jaya" di Kelurahan Banyuanyar yang didalamnya terdapat Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Mina. Pada USP ini masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota dapat melakukan simpan pinjam dana untuk keperluan permodalan usahanya. PEMP adalah untuk meningkatkan kinerja Lembaga memperluas akses modal kepada masyarakat pesisir, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan tujuan kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, pengembangan penguatan kelembagaan social ekonomi, pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Koperasi Perikanan) yang telah berdiri dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) Mengetahui Profil Koperasi Perikanan "Mina Jaya" dan PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang; (2) Mengetahui implementasi program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) melalui Koperasi Perikanan "Mina Jaya" di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang; (3) Mengetahui dampak program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang diterapkan melalui Koperasi Perikanan "Mina Jaya"di Kelurahan Banyuanyar Kabupaten Sampang.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sampang dengan konsentrasi penelitian di Kelurahan Banyuanyar pada Bulan Februari 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif, meliputi teknis pelaksanaan program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) melalui Koperasi Perikanan "Mina Jaya" di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Metode pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sampai pada akhir Tahun 2012, koperasi Mina Jaya masih terdapat satu unit usaha yaitu USP yang difasilitasi modal dari program PEMP dan bekerjasama dengan Bank Bukopin sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Pedoman PEMP. Oleh karenanya Program PEMP dapat meningkatkan pemahaman tentang perkoperasian sehingga tujuan jangka panjang program pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan. Pogram PEMP melalui Koperasi Perikanan Mina Jaya menjadikan para nelayan di Kelurahan Banyuanyar menjadi bisa memanfaatkan simpan pinjam.

Implementasi Program PEMP melalui Koperasi Mina Jaya tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun koperasi agar menjadi badan usaha yang sehat, bermanfaat bagi anggota dan anggota dapat secara aktif berpartisipasi. Pelaksanaan Program PEMP dilakukan dengan sosialisasi program, Fasilitasi /

bantuan manajemen kepada daerah dalam rangka pelaksanaan program PEMP dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan, bantuan kompensasi kenaikan harga BBM, Adibakti Minabahari dan Publikasi. Hal ini diwujudkan dengan Koperasi mengajukan proposal pencairan DEP ke KPA. PEMP Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sampang, Koperasi membuka rekening pada Bank Bukopin yang telah menjadi mitra koperasi sejak Tahun 2004. Oleh karena itu dalam jangka panjang program PEMP di Kabupaten sampang tetap diarahkan pada; a) Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir; b) Mendorong berdirinya koperasi perikanan yang baru tumbuh dari keinginan masyarakat pesisir untuk maju dalam rangka meningkatkan kekuatan ekonominya. Koperasi yang telah dirintis akan menjadi koperasi sekunder di bidang usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Sampang.

Dampak PEMP di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, antara lain sosialisasi dan dana dirasakan kurang mendukung pelaksanaan program. Kegiatan sosialisasi selama ini tidak memberikan informasi sehingga masyarakat kurang memahami program. Pendanaan program yang selama ini berasal dari pemerintah masih jauh dari harapan. Sedangkan sumber daya manusia pelaksana program PEMP sudah sesuai karena merupakan orang-orang sekitar dan sudah paham kondisi wilayahnya. Namun dilihat dari sisi hasil usaha masih jauh dari harapan. Keadaan tersebut diakibatkan antara lain, sistem kemitraan dengan Bank pelaksana menimbulkan ekonomi biaya tinggi; Debitor yahg notabene masyarakat pesisir masih belum sepenuhnya berperan aktif dalam pengembaliannya; pengelola USP masih belum memenuhi standarisasi profesional, SDM masih perlu ditingkatkan kemampuannya; Latar belakang SDM pengurus koperasi yang beragam kemampuannya dan masih perlu meningkatkan kemampuannya.

SUMMARY

Fathat Toriqa Utami ”Evaluation of Coastal Community Economic Empowerment Program (PEMP) for Fishermen as Member of Fisheries Cooperative “Mina Jaya” in the Village of Banyuanyar Distrisct of Sampang Region of Sampang”. Under the supervision of **Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Zainal Abidin, S.Pi, MB.A, MP**

This research intends to examine the problematic situation faced by fishing communities in the Village of Banyuanyar District of Sampang the hold of their daily lives. Focus issues that were examined in this study is the issue of empowerment of fishing communities, especially the PEMP (Coastal Community Economic Empowerment Program) through Cooperative Fisheries "Mina Jaya" in which there are “Unit Simpan Pinjam (USP)” in the Village of Banyuanyar. In this USP that has been registered as a community member can make savings and loan fund for the purposes of its business capital. PEMP is to improve the performance of the Institute expand public access to the coastal capital, so as to increase the income of the people. While the purpose of the economic activities of coastal communities group coaching is to improve the welfare of coastal communities through the development of an entrepreneurial culture, socio-economic development of institutional strengthening, empowering coastal communities to utilize marine and fisheries resources optimally and Economy of Coastal Communities (Fisheries Cooperative) which has been established and sustainable.

The purpose of this research include: (1) Knowing profile of the Fisheries Cooperative "Mina Jaya" and PEMP; (2) Knowing the implementation of PEMP through Cooperative Fisheries "Mina Jaya"; (3) Knowing the impact of the PEMP implemented through Fisheries Cooperatives "Mina Jaya".

This research was conducted in Sampang with research concentrations in Banyuanyar at February 2014. The method used is descriptive qualitative analysis approach. Qualitative descriptive analysis was used to analyze qualitative data, including the technical implementation of the program PEMP through Cooperative Fisheries "Mina Jaya" in the Village of Banyuanyar District of Sampang Region of Sampang. The data collection method used observation, interviews, and documentation.

Until the end of 2012, there is still a cooperative “Mina Jaya” is a business unit of capital facilitated “USP” which facilitated capital from “PEMP” program and in cooperation with the bank's according to the mechanism specified by the Guidelines “PEMP”. Therefore “PEMP” program can improve the understanding of cooperatives so that the long-term goal of community empowerment programs can actually be realized. Fisheries Cooperative Program is “PEMP” through “Mina Jaya” makes the fishermen in the village Banyuanyar be able to take advantage of the savings and loan.

Implementation of Program “PEMP” through the Cooperative Mina Jaya can not be separated from efforts to build a cooperative business entity in order to become healthy, useful for members and members can actively participate. Implementation Program “PEMP” done with socialization programs, facilitation / management assistance to the region in the implementation of the program by involving a third party “PEMP” as a consultant, help compensate rising fuel prices, “Adibakti Minabahari” and Publication. This is realized by cooperative submitted a melting proposal “DEP” to the “KPA”. Department of Marine and Fisheries PEMP Sampang, Cooperative opened an account at the bank's cooperative which has been a partner since 2004. Therefore, in the long-term

program “PEMP” in Sampang lacquer remain focused on; a) Increasing the independence of the coastal communities through the development of economic activities, improving the quality of human resources, community participation, strengthening capital and institutional strengthening of the economy of coastal communities; b) To encourage the establishment of new cooperative fishery coastal communities grew from a desire to move forward in order to improve its economic strength. Cooperative which has pioneered will become a secondary cooperative efforts in the field of marine and fisheries in Sampang.

“PEMP” impact in the Village of Banyuanyar District of Sampang Region of Sampang, including socialization and perceived lack of funds to support the implementation of the program. This socialization activities for not providing information so that people lack an understanding of the program. Funding for this program comes from the government is still far from expectations. While the human resources involved in the program “PEMP” is appropriate because the people around and have understood the condition of the region. But in terms of business results are still far from expectations. The situation is caused, among others, the system raises a partnership with Bank of implementing high-cost economy; Debtors which incidentally coastal communities are still not fully active role in the repayment; “USP” managers still do not meet the professional standardization, human resource still needs to be enhanced; human resource background cooperative management of diverse abilities and still needs to improve his ability.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) khususnya Nelayan Anggota Koperasi Perikanan “Mina Jaya” di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang”. Di dalam skripsi ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi: peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. Mendorong berdirinya koperasi perikanan yang baru tumbuh dari keinginan masyarakat pesisir untuk maju dalam rangka meningkatkan kekuatan ekonominya. Koperasi yang telah dirintis akan menjadi koperasi sekunder di bidang usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Sampang.

Keberadaan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih dan perhargaan sebesar- besarnya kepada:

1. Orang tua kami yang tidak pernah bosan dan lupa untuk memberikan doa, dorongan moral dan materiil serta semangat hingga terselesainya laporan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Zainal Abidin, S.Pi, MB.A, MP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
3. Suami tercinta, Arsa Bandi, SH yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
4. Anakku tersayang, Kafa Billahi Kafila sebagai motivasi Saya demi terselesainya laporan skripsi ini.

5. Adik yang saya banggakan, Tsulatsi Nabila yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan skripsi ini.
6. Fawwaz Ashrur dan semua keluarga besar Moetlee Club serta keluarga KH. Wahid Munif yang telah pemberikan semangat kepada penulis.
7. Teman- teman *AP '07* (Melly, Tari, dan Bustanur) untuk bantuan dan semangatnya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang nantinya dapat dijadikan masukan agar dalam penulisan selanjutnya dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Malang, Juli 2014

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

RINGKASAN ..... **i**

SUMMARY ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2 Masyarakat Pesisir 10
2.3 Karakteristik Masyarakat Nelayan 12
2.4 Analisis Penyebab Kemiskinan Nelayan 16
2.5 Konsep Pemberdayaan 18
2.6 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 22
2.6.1 Peranan PEMP 22
2.6.2 Pelaksanaan PEMP di Koperasi Perikanan 26
2.7 Pengaruh Pengembangan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir 28

III. METODE PENELITIAN **30**
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 30
3.2 Jenis Penelitian 30
3.3 Jenis dan Sumber Data 31
3.3.1 Data Primer 31
3.3.2 Data sekunder 32
3.4 Populasi dan Sampel 33
3.4.1 Populasi 33
3.4.2 Sampel 33
3.5 Metode Pengambilan Sampel 33
3.6 Teknik Pengumpulan Data 34
3.6.1 Wawancara 34
3.6.2 Observasi 34
3.6.3 Dokumentasi 35
3.6.4 Triangulasi 35
3.7 Metode Analisis Data 37

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Profil Koperasi Perikanan " Mina Jaya " 41
4.2 Profil PEMP di Koperasi "Mina Jaya"di Kelurahan Banyuanyar 42
4.2.1 Gambaran Umum PEMP 42
4.2.2 Tujuan PEMP 43
4.3 Implementasi Program PEMP melalui Koperasi "Mina Jaya" 48
4.3.1 Perencanaan Program PEMP melalui Koperasi "Mina Jaya" 48
4.3.2 Implementasi Program PEMP melalui Koperasi "Mina Jaya" 51
4.3.3 Mekanisme Pelaksanaan 53
4.3.4 Mekanisme Penyaluran DEP 55
4.3.5 Pengembangan Usaha Ekonomi 57
4.4 Dampak PEMP terhadap Kemandirian Ekonomi 58

V. KESIMPULAN DAN SARAN 68
5.1 Kesimpulan 68
5.2 Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 73

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Nomor **Teks** **Halaman**

Tabel 3.1 Kegiatan Penelitian 30

Tabel 3.2 Data Observasi dan Wawancara..... 32

Tabel 3.3 Kriteria Penentuan Responden dalam penelitian..... 34

Tabel 3.4 Instrumen untuk Menjawab Tujuan Penelitian Nomor 1 39

Tabel 3.5 Instrumen untuk Menjawab Tujuan Penelitian Nomor 2 40

Tabel 3.6 Instrumen untuk Menjawab Tujuan Penelitian Nomor 3 40

Tabel 4.1 Keanggotaan Koperasi Perikanan “Mina Jaya“ 41

Tabel 4.2 Pegawai Koperasi Perikanan “Mina Jaya“..... 41

Tabel 4.3 Pengawas Koperasi Perikanan “Mina Jaya“..... 42

Tabel 4.4 Tugas dan Jabatan Anggota Koperasi Perikanan “Mina Jaya“ 42

Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Penelitian tentang Implementasi PEMP 63

Tabel 4.6 Kinerja Program PEMP 65

Tabel 4.7 Dampak Program PEMP 66

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

Nomor **Teks** **Halaman**

Gambar 3.1 Metode Analisis Data 39

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor **Teks** **Halaman**

Lampiran 1. Peta Lokasi Kabupaten Sampang 73

Lampiran 2. Pedoman Wawancara 74

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat nelayan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pada umumnya mereka adalah kelompok masyarakat tertinggal yang berada pada level paling bawah, baik tertinggal secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan tradisional bukan saja berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya.

Begitu halnya dengan masyarakat Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dimana masyarakatnya dominan nelayan. Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang terletak di Pulau Madura ini memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian (49,10%), utamanya subsektor perikanan. Alternatif sumber penghasilan masyarakat minim, hanya mengandalkan hasil laut. Terbatasnya sumber penghasilan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Sampang. Walaupun persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berhasil ditekan dari 50,12% pada 2007 menjadi 31,94% pada 2010, data statistik 2010 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang menempati peringkat paling bawah dari seluruh kabupaten di Jawa timur. Rendahnya nilai IPM ini menjadi penyebab Kabupaten Sampang masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Jika ditelisik, ada tiga faktor yang memengaruhi kualitas SDM di Sampang, salah satunya yaitu sumber penghasilan (Hasil observasi, 2014).

Pendapatan keluarga nelayan di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sangat bergantung pada perubahan iklim laut. Dengan kondisi cuaca ekstrem yang terjadi beberapa tahun 2013, hasil tangkapan ikan oleh nelayan cenderung menurun. Terlebih pada kondisi cuaca buruk di laut, nelayan terhambat melaut. Saat cuaca tak bersahabat mereka tak bisa melaut sehingga pendapatan berkurang. Diperlukan diversifikasi mata pencaharian agar perekonomian keluarga mereka tak terganggu. Karena, jika mereka menganggur, kebutuhan keluarga sehari-hari bisa tidak tercukupi dengan baik.

Melihat banyaknya masyarakat yang berprofesi nelayan khususnya pada Kelurahan Banyuanyar, dipandang perlunya kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan (Kusnadi, 2003:10). Selanjutnya Kusnadi juga menjelaskan tujuan dari pemberdayaan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan nelayan, distribusi pendapatan relatif merata dan kedepannya mobilitas vertikal nelayan dapat diraih secara bertahap. Proses pemberdayaan ini mengganggap nelayan sebagai pelaku utama yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya. Pemanfaatan elemen pemberdayaan ekonomi merupakan prasyarat dalam upaya pemberdayaan komunitas, khususnya komunitas nelayan.

Sejak tahun 2004-2008, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat

sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan (Hasil observasi, 2013).

Pemerintah memandang potensi wilayah pesisir yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya. Salah satu program yang bertujuan dan mendukung ke arah tersebut adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Tujuan utama PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan (Kusnadi, 2003: xvi).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat bahwa salah satu kelemahan pelaksanaan program pada umumnya adalah kurangnya kemampuan menilai hasil kerja suatu organisasi. Demikian halnya pada program PEMP perlu dilakukan kegiatan evaluasi, harapannya agar penelitian ini bisa menilai sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program yang telah berjalan. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan hasil, manfaat dan dampak pelaksanaan Program PEMP, dan untuk mengetahui pencapaian sasaran dan tujuan, sebab keberhasilan atau kegagalannya, serta berbagai jenis manfaat yang ditimbulkannya. Selanjutnya dengan mengetahui kekurangan, ketidakberhasilan dapat sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kembali kebijakan (*reformulation*) atau penyesuaian (*adjusment*) yang akan datang.

Penelitian ini bermaksud mengkaji situasi problematik yang dihadapi masyarakat nelayan Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dalam melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Fokus persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah pemberdayaan masyarakat

nelayan, terutama Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) melalui Koperasi Perikanan “Mina Jaya” di Kelurahan Banyuanyar yang di dalamnya terdapat Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Mina. Pada USP ini masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota dapat melakukan simpan pinjam dana untuk keperluan permodalan usahanya. PEMP adalah untuk meningkatkan kinerja lembaga memperluas akses modal kepada masyarakat pesisir, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan tujuan kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, pengembangan penguatan kelembagaan social ekonomi, pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Koperasi Perikanan) yang telah berdiri dan berkelanjutan.

PEMP dilaksanakan sejak pada tahun 2009, kegiatannya adalah menekankan pada usaha peningkatan kemampuan SDM dari pengurus koperasi perikanan “Mina Jaya” agar dapat menjalankan kaidah–kaidah perkoperasian dengan suatu sistem yang lebih baku dan akurat. Pembinaan diarahkan secara langsung kepada pengurus dan karyawan koperasi terkait persoalan perkoperasian, serta inventarisasi dan pengelompokan data keuangan, mengikhtisarkan data keuangan dari data yang dikelompokkan menjadi buku besar dan mengolah data keuangan dari buku besar menjadi neraca dan perhitungan laba rugi.

Unit yang berjalan sampai saat ini di Koperasi Perikanan “Mina Jaya” adalah Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Kedai Pesisir. USP ini memiliki 179 debitur (anggota) yang telah melakukan transaksi dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat pesisir dengan batas waktu 3 tahun dengan pinjaman maksimal Rp. 25 juta per anggota. Dari hasil pembinaan diketahui bahwa masih

banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mencicil ke USP koperasi perikanan “Mina Jaya”. Hal tersebut diperkirakan karena perekonomian debitur yang rata-rata nelayan dan pengolah ikan pendapatannya menurun seiring dengan menurunnya hasil tangkapan ikan; kekurangtegasan pengurus dan karyawan koperasi untuk melakukan eksekusi atas angsuran debitur yang macet dengan langkah persuasive terlebih dahulu sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara debitur dan koperasi.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Evaluasi Kinerja Koperasi Perikanan “Mina Jaya” dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), khususnya Nelayan di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang).

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana profil Koperasi “Mina Jaya” dan PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana implementasi program PEMP melalui Koperasi Perikanan “Mina Jaya” di Kelurahan Banyuanyar Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana dampak program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang diterapkan melalui Koperasi Perikanan “Mina Jaya”di Kelurahan Banyuanyar Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui antara lain untuk:

1. Mengetahui Profil Koperasi Perikanan "Mina Jaya" dan PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui implementasi program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) melalui Koperasi Perikanan "Mina Jaya" di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
3. Mengetahui dampak program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang diterapkan melalui Koperasi Perikanan "Mina Jaya"di Kelurahan Banyuanyar Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kontribusi kepada beberapa pihak yaitu :

1. Lembaga akademis, untuk menambah khasanah keilmuan tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah di bidang pemberdayaan terutama mengenai masalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
2. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi dan tambahan ilmu selain yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai pedoman untuk mengadakan kegiatan penelitian lebih lanjut. Selain itu juga merupakan bentuk aplikasi dari berbagai ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

3. Nelayan, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat khususnya nelayan sebagai wahana pengembangan potensi SDM pada masyarakat nelayan.
4. Pemerintah, sebagai pertimbangan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah di Kelurahan Banyuanyar, khususnya dalam penentuan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat nelayan, dan harapannya pada nantinya sebagai bahan acuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Koperasi “Mina Jaya”.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nurani (2009) mengenai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, bahwa Program PEMP di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara telah berkontribusi memicu perubahan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir. Program PEMP memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan terjadinya mobilitas vertikal nelayan dari status buruh menjadi nelayan pemilik unit penangkapan (pengusaha). Masyarakat pesisir di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi sebagai kekuatan dan peluang, disamping kendala sebagai kelemahan dan ancaman. Kekuatannya, yaitu: tenaga kerja cukup tersedia, usia potensial, tingkat pendidikan dan ketekunan/motivasi; peluangnya, yaitu: potensi SDI, kesempatan kerja di bidang perikanan terbuka, keberadaan koperasi LEPP-M3 dan dukungan pemerintah daerah; kelemahannya, yaitu: keterbatasan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, tidak berkembangnya kelompok masyarakat pesisir dan keterbatasan fasilitas penunjang usaha perikanan; dan ancamannya, yaitu: harga ikan rendah, harga BBM tinggi, cuaca dan musim yang buruk; dan *illegal fishing*.

Selanjuntnya Nurani (2009) menyatakan bahwa prioritas strategi perbaikan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera, yaitu:

1) Pengembangan akses pemasaran;
2) Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan;
3) Pengembangan akses permodalan;
4) Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha perikanan;
5) Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir;

6) Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.

Penelitian lainnya yang terkait pemberdayaan dilakukan oleh Widiastuti (2009) mengenai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena pelaksanaan PEMP pada Lembaga Keuangan Mikro dan kedai pesisir, dimana lembaga keuangan mikro dan kedai pesisir sangat bermanfaat bagi masyarakat pesisir di Kota Semarang sedangkan SPDN relatif kurang bermanfaat.

Peneliti lainya adalah Fedriansyah (2008), meneliti tentang Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Tugu, Semarang dengan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil penelitian diperoleh bahwa Input program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tugu antara lain sosialisasi dan dana dirasakan kurang mendukung pelaksanaan program. Kegiatan sosialisasi selama ini tidak memberikan informasi sehingga masyarakat kurang memahami program. Pendanaan program yang selama ini berasal dari pemerintah masih jauh dari harapan. Sedangkan sumber daya manusia pelaksana program PEMP sudah sesuai karena merupakan orang-orang sekitar dan sudah paham kondisi wilayahnya. Output program PEMP adalah ketertarikan ikut program karena masyarakat pesisir ingin meningkatkan hasil tangkapan. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan lembaga keuangan mikro swamitra yang memberikan akses kredit kepada masyarakat. Tetapi dengan adanya sistem kredit menggunakan jaminan menyulitkan masyarakat untuk mengakses kredit. Secara kelembagaan program PEMP sudah sesuai dengan perencanaan, hal ini terlihat dari peningkatan-peningkatan kelembagaan itu sendiri. Hasil program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah penilaian masyarakat

terhadap koperasi dan unit usaha masih dianggap kurang bermanfaat, mereka takut akan keberlangsungan koperasi.

2.2 Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi ini pun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier, sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut untuk menyokong kehidupan masyarakat pesisir (Nikijuluw, 2001:54).

Namun untuk lebih operasional, definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil. Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek (Nikijuluw, 2001:54).

Sejak dulu program pemberdayaan nelayan dan pesisir belumlah tergarap secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya alam kelautan masih

dilakukan secara parsial dan kurang didukung oleh teknologi yang tepat guna sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal. Kenyataan tersebut berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang tergolong rendah bahkan sebagian hidup dalam garis kemiskinan (Suyanto, 2005:22).

Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, memang mereka dapat pergi jauh dari pantai dengan cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan besar. Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti tidak begitu banyak dan berarti dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak (Nikijuluw, 2001:56).

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan sekaligus peluang memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh proses transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan IPTEK. Sementara itu, di sisi lain tantangan yang paling fundamental adalah bagaimana untuk keluar dari krisis ekonomi yang menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mempersiapkan perekonomian nasional dalam percaturan global abad 21. Dalam rangka, menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja dalam peningkatan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor pembangunan (Karim, 2000).

Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan

peluang tersebut. Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kelautan yang besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sumbangan yang sangat berarti dari sumberdaya kelautan tersebut, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang dimiliki Indonesia. kelautan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional dimasa depan (Karim, 2000).

Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (*peryphery*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (*mainstream*) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geo-politis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan potitik. Sehingga secara ekonomis-politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional (Karim, 2000). masyarakat pesisir terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier, dan sarana produksi perikanan.

2.3 Karakteristik Masyarakat Nelayan

Komunitas masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris ng petani. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang

diagarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal maka nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan cenderung memiliki karakteristik khas, yakni, keras, tegas, dan terbuka. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat pesisir khususnya nelayan sulit menerima perubahan karena mereka menganggap perubahan itu akan membawa pengaruh negatif bagi kehidupan mereka. Berdasarkan karakteristik *human system* dalam tipologi *fishery system* seperti yang dikemukakan oleh Charles (2001:370), terdapat beberapa karakteristik umum dari nelayan (*fishers*) yaitu:

a. Nelayan berada menurut latar belakang sosial seperti tingkat umur, pendidikan, status sosial dan tingkat kohesitas dalam komunitas mikro (antar nelayan dalam satu group) atau dalam komunitas makro (nelayan dengan anggota masyarakat pesisir lainnya).
b. Komunitas nelayan komersial, nelayan dapat bervariasi menurut *occupational commitment*nya seperti nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan, atau menurut *occupational pluralism*-nya seperti nelayan dengan sumber pendapatan beragam, dan lain sebagainnya.
c. Nelayan dapat bervariasi menurut motifasi dan perilaku diaman dalam hal ini terdiri dari dua kelompok yaitu nelayan dengan karakteristik *profit-maximizers* yaitu nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar nya dan cenderung berperilaku seperti “perusahaan”, dan kelompok nelayan *satisficers* atau nelayan yang aktif menangkap ikan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup.

Selain ditinjau berdasarkan karakterristik umum masayarakat nelayan juga dapat ditinjau berdasakan pada tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi kedalam tiga kategori, yaitu:

a. Nelayan Tradisional

Nelayan Tradisional adalah nelayan yang dalam aktivitas-aktivitas penangkapan ikan menggunakan peralatan yang sangat sederhana, seperti: perahu, jukong, jaring sederhana dan pancing. Nelayan jenis ini beroperasi didaerah 0-3 mil laut garis pantai. Dengan perlatan sederhana, nelayan jenis ini hanya mengandalakan kemapuan seadanya untuk menangkap ikan dilaut. Sebagaimana kebanyakan nelayan tradisional, mata pencaharian mereka hanya mengandalakan jenis ikan yang tersebar tidak jauh dari pantai. Dengan demikian, memungkinkan terjadinya ketergantungan terhadap lingkungan di sekitar pantai, dan kelangsungan terhadap habitat ikan yang ada di pantai.

b. Nelayan Semi Modern

Nelayan semi modern merupakan nelayan yang sudah mempunyai perlengakapan/peralatan alat tangkap, kapal dan sarana penunjang lainnya lebih maju dibandingkan dengan nelayan tradisional. Nelayan ini sudah memperlengkapi kemampuan untuk menangkap ikan dengan peralatan seperti: kapal dengan mesin yang bertonase <10 GT, jaring dan peralatan navigasi (kompas). Areal penangkapan (*fishing ground*) mulai dari 3-6 mil dari garis pantai. Keberadaan nelayan semi modern memerlukan penanganan yang lebih intensif, mengingat adanya pola pikir sebagian dari mereka untuk merubah pola tradisional ke pola lebih modern akan berdampak bagi kemajuan nelayan di masa depan.

Di samping nelayan jenis banyak didomiansi oleh penduduk lokal, juga kepemilikan terjadi patungan anatara penduduk lokal dan luar daerah. Fenomena ini memungkinkan adanya kerja sama antara penduduk lokal dan luar daerah. Kerja sama yang banyak ditemukan adalah pola dimana penduduk lokal bertugas untuk mengatur semua aktivitas kerja yang berhubungan dengan penangkapan, perawatan, dan pemasaran hasil tangkap. Sedangkan penduduk luar kota mengontrol terhadap aktivitas-aktivitas di atas dan hasil yang diperoleh.

c. Nelayan Modern

Nelayan modern merupakan salah satu jenis nelayan yang sudah menggunakan teknologi modern dalam menangkap ikan dilaut. Nelayan jenis ini banyak menggunakan alat-alat modern seperti: penentuan posisi GPS (*Global Potisioning System*), pendekatan ikan, jaring gill net, bubu ikan, bubu lobster dan perbekalan yang lainnya. Dengan bertambahnya kemampuan teknologi, nelayan jenis ini mampu bertahan selama 3 bulan di tengah lautan. Areal pengakapan 6-mil ke atas dari garis pantai. Sedangkan derah operasi mereka meliputi Laut Jawa, Laut makasar, NTT, laut timor samudera Hindia, selat madura dan kepulauan masalembo.

Berkembangnya nelayan modern kebanyakan berasal dari Tanjung Balai (Riau) yang beroperasi pada daerah di luar areal wilayah nelayan tradisional dan semi modern. Kedatangan nelayan ini, secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan teknologi nelayan di daerah Trenggalek. Nelayan disini sedikit mulai tahu cara modern dalam menangkap ikan di laut, seperti penentuan posisi kapal dengan GPS, pendeteksi keberadaan ikan dengan fish sinder dan sebagainya.

2.4 Analisis Penyebab Kemiskinan Nelayan

Telah diketahui bahwa lingkungan nelayan termasuk ke dalam daerah dengan pendapatan yang agak rendah. Maka tentu saja perlu adanya penggiatan kegiatan ekonomi dengan berbasiskan sumber daya yang ada. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Untuk kita, terlebih dahulu harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan nelayan.

Secara umum, kemiskinaan masyarakat pesisir disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, perkerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir *(Elfindri. 2002:24).* Akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat nelayan, adalah sebagai berikut.

a. Kondisi Alam

Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidak ;pastian (*uncertainty)* dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle)* setiap tahunnya.

b. Tingkat Pendidikan Nelayan

Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat di hasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengusaha nelayan terhadap teknologi (K*usnadi, 2000).*

c. Pola Kehidupan Nelayan Sendiri

Boros dan malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi penyebab kemiskinan nelayan. Padahal kultur nelayan jika dicermati justru memiliki etos kerja yang handal. Bayangkan mereka pergi subuh pulang siang, kemudian menyempatkan waktunya pada waktu senggang untuk memperbaiki jaring. Memang ada sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan budaya boros dan hal tersebut menyebabkan posisi masyarakat miskin semakin lemah.

d. Pemasaran Hasil Tangkapan

Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran.

2.5 Konsep Pemberdayaan

Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses Konsep ini sesungguhnya juga merupakan hasil kerja proses interaktif baik pada tataran ideologis maupun pada tataran implementasi. Pada tataran ideologis, konsep "*empowerment*" merupakan hasil interaksi antara konsep "*top-down*" dan "*bottom-up*", antara "*growth strategy*" dan "*people-centered strategy*" (Prijono dan Pranarka 1996:4).

Sedangkan pada tataran implementasi, interaktif akan terjadi melalui pertarungan antar otonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam konsep pemberdayaan juga mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang tertinggal dan berada di bawah garis kemiskinan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto,2007:60).

Berbagai paparan mengenai pemberdayaan diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya dengan memberikan kewenangan pada individu atau masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai subyek bukan lagi sebagai obyek dari dunianya. Memberdayakan mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, sebagai upaya untuk

memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap kekuatan penekan berupa penguasa di segala sektor kehidupan.

Proses pemberdayaan menurut Prijono dan Pranarka (1996:63) yang dapat dilakukan antara lain melalui upaya-upaya:

a. Pendekatan sosial yang mengarah kepada terjadinya perubahan sosial dengan berusaha menciptakan kondisi sekarang dan akan datang untuk menjadi lebih baik, melalui subsidi, beasiswa, sasaran dan fungsi sosial, serta perilaku sosial dan dengan proses perubahan sosial, baik dalam fungsional maupun kelembagaan sosial.
b. Strategi perubahan masyarakat, dengan langkah-langkah: identifikasi situasi dan kondisi, perumusan masalah, analisis pengalaman, pengorganisasian pengalaman, penguatan berkelanjutan, dan pengeorganisasian berkelanjutan.
c. Intervensi, berupa tindakan: aksi ekonomi masyarakat lokal, membangun lingkungan sosial, dan kebijakan sosial melalui program-program sosial.
d. Konsumsi, yang sifatnya pemberdayaan sementara berupa pemberian: hadiah, beasiswa, dan uang, atau materi yang lain.

Terdapat pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain meliputi: obyek yang diberdayakan, sasaran materiil, dan sasaran fomal, desain pemberdayaan, subyek pemberdayaan, materi pemberdayaan, budaya pemberdayaan, struktur pemberdayaan, dan iklim pemberdayaan.

Definisi pemberdayaan ditambahkan oleh Wrihatnolo, dan Dwidjowijoto (2007: 2), bahwa sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai suatu proses, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu :

a. Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan, dalam hal ini adalah masyarakat, diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat masyarakat mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimuai dari dalam diri mereka.

b. Pengkapasitasan

Setelah tahap penyadaran dilakukan, masyarakat yang menjadi target pemberdayaan diberikan pengkapasitasan atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan kuasa atau daya terlebih dahulu masyarakat dibekali dengan *capacity building* untuk membuat mereka *skillfull* dalam mengelola kuasa tersebut. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan system nilai.

c. *Empowerment*

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri. Pada tahap ini masyarakat diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Agar upaya pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pemberdayaan perlu mempergunakan tiga tahapan, yaitu penyiapan (bagi yang hendak diberdayakan), pemihakan (terhadap yang diberdayakan), dan perlindungan (bagi yang sudah mandiri). Kartasasmita (1996:74) menambahkan upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arah, antara lain:

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah usaha untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.

b. Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik maupun sosial, yang dapat di jangkau oleh masyarakat miskin, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

c. Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan.

Ketiga arah pemberdayaan di atas berpangkal pada dua sasaran utama, yaitu: Untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta untuk memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi, pembangunan prasarana dasar. Hal ini terkait pula dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

2.6 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

2.6.1 Peranan PEMP

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu program pemerintah yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan di daerah pesisir melalui pemberdayaan masyarakat. Secara umum, PEMP mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan (Departemen Kelautan dan Perikanan*, 2005).* Secara khusus, program PEMP mempunyai tujuan:

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang didampingi dengan pengembangan kegiatan sosial, pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir.
b. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha utnuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang terkait dengan sumberdaya perikanan dan kelautan.

c. Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
d. Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam mendukung perkembangan wilayahnya.
e. Mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipasif dan transparan dalam kegiatan masyarakat.

Sasaran PEMP adalah masyarakat pesisir yang memiliki mata pencaharian atau berusaha dengan memanfaatkan potensi pesisir seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan kelautan, yang kurang berdaya dalam peningkatan/ penguatan usahanya. PEMP bukan bersifat hadiah, melainkan pemberdayaan sehingga diharapkan dapat terus berkembang dan menyentuh sebagian besar masyarakat pesisir yang menjalankan jenis usaha yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut serta usaha lain yang terkait. Dalam pelaksanaannya, Program PEMP dikelola oleh organisasi yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat desa. Adapun menurut Departemen Kelautan dan Perikanan *(2005),* kelembagaan PEMP dan peranannya dalam pelaksanaan program tersebut, antara lain:

a. Pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yang bertindak sebagai penanggung jawab dan pembina Program PEMP pada tingkat nasional, seperti penyusunan pedoman umum, melaksanakan sosialisasi di tingkat nasional, pelatihan lingkup nasional, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Penanggungajwab program adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Dirjen KP3K).
b. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menangani Program PEMP.

Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi bertugas mengusulkan nama-nama kabupaten /kota calon penerima program, dan terlibat dalam sosialisasi, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan dana dekonsentrasi. Dinas Kelautan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab operasional program bertugas menetapkan Konsultan Manajemen (KM) kabupaten/ kota, menetapkan koperasi pelaksana, sosialisasi, dan publikasi tingkat kabupaten/kota, pembentukan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) bagi kabupaten/kota penerima baru Program PEMP, perekrutan TPD (Tenaga Pendamping Desa), pelatihan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Konsultan Manajemen (KM), yaitu konsultan yang membantu aspek teknis dan manajemen Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Program PEMP. Pendampingan meliputi kegiatan: inventarisasi potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir dalam modal usaha, pemetaan jalur produksi, pasar dan konsumen, serta kemungkinan pengembangan program melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Sejak tahun 2005, KM juga bertugas membantu Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota dalam proses revitalisasi LEPP-M3 menjadi berbadan hukum koperasi, dan bersama dengan TPD mendampingi masyarakat pesisir untuk mengakses DEP, melakukan pendampingan teknis serta manajemen usaha. KM diutamakan yang berasal dari daerah setempat, dengan harapan mengetahui karakter, potensi, dan permasalahan daerahnya.

d. Tenaga Pendamping Desa (TPD), yaitu tenaga profesional yang bersedia tinggal di tengah masyarakat sasaran dan bertugas mendampingi masyarakat selama kegiatan program dalam bentuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat, terutama dalam upaya menyiapkan rencana usaha, mengakses modal, dan pengelolaan kegiatan usahanya. TPD diutamakan berkualifikasi minimal D3 di bidangnya dan berasal dari daerah sekitar kegiatan program.

e. Koperasi, yang merupakan *holding company* masyarakat pesisir dengan berbagai unit usaha, yang berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan Program PEMP di daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota, dan dengan lembaga perbankan/pembiayaan sebagai mitra usaha. Dalam menjalankan fungsinya, koperasi menerima DEP sebagai hibah yang dijaminkan kepada perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Dana pinjaman selanjutnya disalurkan ke masyarakat pesisir melalui LKM Swamitra Mina, USP, atau BPR Pesisir milik koperasi. Bagi kabupaten yang baru dan belum memiliki koperasi, dalam waktu 3 bulan pemerintah daerah harus meningkatkan status kelembagaan LEPP-M3 menjadi Koperasi LEPP-M3. Koperasi juga diharapkan berperan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan unit usaha lain, seperti unit usaha perikanan tangkap/budidaya, SPDN, kedai pesisir, dan wisata bahari.

f. Bank Pelaksana, yaitu lembaga keuangan perbankan yang ditetapkan oleh DKP dengan tugas dan fungsi: (1) menyediakan kredit bagi koperasi sebagai konsekuensi dari adanya Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang dijaminkan untuk kegiatan penguatan modal, (2) menyalurkan DEP langsung dengan pola hibah melalui rekening koperasi yang ada di Bank Pelaksana untuk kegiatan pelaksanaan BPR Pesisir, SPDN, dan atau Kedai Pesisir; dan, (3) melakukan

pendampingan teknis dan administratif kepada Koperasi LEPP-M3 dan atau LKM/USP.

g. Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) merupakan kelompok masyarakat yang terpilih untuk mendapat dana ekonomi produktif (DEP). KMP dapat berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang didasarkan atas usaha dan wilayah tempat tinggal, misalnya kelompok nelayan, kelompok pedagang, dan lain-lain. Kelompok tersebut di tunjuk oleh DKP Kabupaten atas dasar kualifikasi kelompok dan rekomendasi mitra desa dalam hal ini adalah Pemerintah Desa.

2.6.2 Pelaksanaan PEMP di Koperasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengidentifikasi keterbelakangan kelompok nelayan kecil, sebagai akibat dari rendahnya budaya kewirausahaan, kurangnya partisipasi dalam usaha produktif dan tersumbatnya akses permodalan. Pemerintah hendak mengubah kondisi ini melalui perubahan budaya seperti menumbuhkan bakat kewirausahaan bagi anggota keluarga nelayan melalui penyuluhan, pentingnya berkelompok, mendidik berkoperasi. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (selanjutnya disingkat PEMP) adalah kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi untuk menguatkan kelembagaan yang sudah dibentuk dengan mengucurkan dana bergulir atau Dana Ekonomi Produktif (selanjutnya disingkat DEP) melalui Koperasi Nelayan. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat APBN) untuk dijadikan dana bergulir atau DEP.

Kebijakan pemerintah membentuk koperasi nelayan sebagai sasaran perantara dalam menyalurkan dana program PEMP merujuk pada Pasal 33 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI tahun 1945), yaitu : Ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan…Ayat 4

berbunyi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Badan usaha yang paling sesuai dengan rumusan di atas adalah badan usaha koperasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumantoro (1986: 35), bahwa Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 merupakan amanat dari Proklamasi yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dari pasal 33 kita bisa melihat pembagian bidang usaha yang terdiri dari : sektor koperasi, sektor usaha negara, dan sektor usaha swasta. Jika ditilik dari urutannya maka yang lebih diutamakan adalah koperasi.

Kelima unsur pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tersebut di atas diakomodasikan oleh pemerintah ke dalam lima kegiatan. Empat di antaranya menyangkut perkoperasian dan hanya satu unsur yang menjadi beban Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1). Kegiatan pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan,

2). Pendirian Koperasi Nelayan

3). Pendirian lembaga keuangan mikro atau usaha simpan-pinjam,

4). Pendirian Kedai Pesisir dan

5). Pendirian penjualan solar bersubsidi (Solar Packed Dealer Nelayan).

Kegiatan pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan menjadi beban tugas Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan kegiatan pada butir 2 (dua) sampai butir 5 (lima) sesuai ketentuan Buku Pedoman Umum PEMP dibebankan kepada Koperasi Nelayan sebagai sasaran perantara.

2.7 Pengaruh Pengembangan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang normal baik dalam segi sosial, ekonomi maupun dalam segi psikologi, sejahtera fisik maupun non fisik. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang adalah keadaan ekonominya, demikian pula yang terjadi pada masyarakat pesisir pada umumnya.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dipandang dalam bentuk kesehatan. Bagaimana mereka hidup dengan layak dan sehat jasmani maupun rohani. Pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan tinggi rendahnya standar hidup seseorang. Oleh karena itu, status kesehatan yang relatif baik dibutuhkan oleh manusia untuk menopang semua aktivitas hidupnya. Setiap individu akan berusaha mencapai status kesehatan tersebut dengan menginvestasikan dan atau mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa kesehatan (Widyatma, 2010:45).

Maka untuk mencapai kondisi kesehatan yang baik tersebut dibutuhkan sarana kesehatan yang baik pula. Kehidupan manusia yang semakin modern dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek kesehatan lambat laun seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi mampu menjelaskan secara rasional bagaimana mengoptimalkan status kesehatan, sehingga berbagai upaya dilakukan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seperti diantaranya: menemukan cara penyembuhan berbagai penyakit, penemuan obat-obat baru, teknik kedokteran yang lebih mutakhir, pengenalan dan antisipasi penyakit yang lebih dini dan berbagai hal tentang upaya mewujudkan status kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh bagi setiap masyarakat.

Dilihat dari perspektif ekonomi, sisi penting mengenai faktor kesehatan bagi manusia akan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (*quality*

of human resources) itu sendiri. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia SDM akan ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan per kapita. Dalam kegiatan perekonomian, ketiga indikator kualitas sumber daya manusia tersebut secara tidak langsung juga akan berimbas pada tinggi rendahnya produktifitas sumber daya manusia, dalam hal ini khususnya produktifitas tenaga kerja. Melihat kekayaan Indonesia dibidang kemaritiman pada dipandang perlu untuk mengoptimalkan pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat pesisir tersebut maka kesejahteraannya pun turut berkembang.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang, khususnya di Koperasi Perikanan “Mina Jaya” pada bulan Februari sampai Juli 2014 dengan perincian waktu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Februari 2014 – Juli 2014)											
		Februari				April				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Tempat Penelitian	X	x										
	Persiapan Administrasi			x	X	x	x						
2.	Observasi dan Wawancara								x	x			
	Pengumpulan Data Primer								x	x			
	Pengumpulan Data Sekunder								x	x			
	Pengolahan Data								x	x			
3.	Pembuatan Laporan										x	x	x

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Irawan. 2002:35).

Pemakaian penelitian kualitatif ini dipilih sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian yang dipilih, untuk memahami dan mendeskripsikan PEMP melalui Koperasi “Mina Jaya” di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, serta bagaimana implementasinya yang nantinya akan menghasilkan suatu deskripsi melalui pengamatan tehadap tingkah laku obyek yang diteliti yaitu masyarakat nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pelabuhan Perikanan dan Dinas Tempat

Pelelangan Ikan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Fenomena yang ditangkap pada subyek penelitian akan menjadi suatu bahan yang akan dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh sesuai dengan rumusan penelitian.

Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam *(depth study)* mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Cakupan studi kasus dapat meliputi segmen-segmen tertentu saja. Dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa (Azwar, 2007 : 8).

Dalam penelitian ini menjelasan bahwa studi kasus peneliti berusaha menguji tingkah laku obyek yang diteliti yaitu masyarakat nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pelabuhan Perikanan dan Dinas Tempat Pelelangan Ikan serta anggota Koperasi “Mina Jaya” di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang secara mendalam.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2007: 91). Metode pengambilan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari interaksi dengan subyek penelitian yang memahami program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) melalui Koperasi “Mina Jaya”.

Tabel 3.2 Data Observasi dan Wawancara

Data Observasi	Data Wawancara
a) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pelabuhan dan Perikanan terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). b) Peran Koperasi “Mina Jaya” di Kelurahan Banyuanyar c) Sikap dan perilaku masyarakat nelayan.	4. Profil PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) di Koperasi “Mina Jaya”di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. 5. Evaluasi kinerja Koperasi “Mina Jaya” dalam program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. 6. Evaluasi dampak program PEMP yang diterapkan melalui Koperasi “Mina Jaya” di Kelurahan Banyuanyar

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti yang dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti, dimana data tersebut merupakan hasil kegiatan orang lain, hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulanya secara langsung, sumber data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan serta arsip yang berhubungan dengan keadaan geografis dan topografi, keadaan social ekonomi penduduk dan gambaran umum usaha perikanan di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang. Data sekunder diperoleh dari:

1). Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, berupa laporan tahunan

2). Kantor Dinas Pelabuhan Perikanan Kabupaten Sampang, berupa profil usaha perikanan masyarakat.

3). Kantor Dinas Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berupa data kegiatan pelelangan ikan.

4). Dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir, berupa jumlah masyarakat yang diberdayakan.

5) Dokumen Koperasi “Mina Jaya”, berupa jenis-jenis pemberdayaan yang diterapkan pada masyarakat Kelurahan Banyuanyar.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 131). Kegiatan penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan penelitian, yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang
2. Pengurus Koperasi dan Wirawasta Kabupaten Sampang
3. Masyarakat nelayan di Kelurahan Banyuanyar

3.5 Metode Pengambilan Sampel

Metode ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Ada beberapa syarat dalam pengambilan sampel:

1. Pengambilan sampel didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi
2. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi

3. Penentuan karakteristik responden dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan (Arikunto, 2006: 139).

Kriteria responden dalam penelitian ini, dipilih sesuai dengan pemahaman responden mengenai masalah penelitian, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Penentuan Responden dalam penelitian

Lembaga	Masyarakat
- Memahami tentang Profil PEMP - Terbuka dan bersedia untuk dijadikan reponden tanpa ada intervensi dari pihak manapun - Ramah, jujur dan ikhlas dalam memberikan informasi	- Murni bermata pencaharian nelayan (pesisir) - Terlibat dalam PEMP - Bersedia untuk dijadikan reponden tanpa ada intervensi dari pihak lain - Jujur dalam memberikan informasi

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan tujuan penelitian. dalam wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan (Marzuki,2005:66). Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden mengenai kinerja Koperasi “Mina Jaya” dalam PEMP di Kelurahan Banyuanyar.

3.6.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indera. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Jika wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lainnya (Sugiyono, 2008:203). Menurut (Sugiyono, 2008:203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang

terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Observasi dilakukan atas obyek-obyek antara lain:

d) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pelabuhan dan Perikanan terkait Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).
e) Peran Koperasi “Mina Jaya” di Kelurahan Banyuanyar
f) Sikap dan perilaku masyarakat nelayan.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen-dokumen resmi dalam menjajaki sumber tertulis. Sehingga memperkaya data disamping itu dapat membantu peneliti dalam penganalisaan. Peneliti mencari data sekunder dengan jalan mengadakan studi kepustakaan dan rekaman. Lincoln dan Guba seperti yang diikuti oleh Sonhaji (1994) mengartikan *rekaman* sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi *accountin.* Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu setiap tulisan atau rekaman, yaitu dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu.

Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan sumber ini. Pertama, sumber ini selalu tersedia baik yang ada pada dinas terkait. Kedua merupakan sumber informasi yang stabil baik keakuratanya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau maupun dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan. Ketiga merupakan sumber informasi yang kaya secara konseptual relevan dan mendasar dalam konteknya.

3.6.4 Triangulasi

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dibutuhkan triangulasi data. Triangulasi data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Apabila upaya melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data

secara cermat sesuai dengan teknik yang digunakan, maka hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat tercapai dengan baik. Setelah diperoleh data yang sudah disusun secara sistematis dalam rangkuman yang jelas, maka langkah selanjutnya memeriksa keabsahan data yang ada. Hal ini dilakukan dengan kategorisasi data yang ada.

Dari data yang sudah dikategorikan tersebut, kemudian dilakukan pengelolaan data sedemikian rupa yaitu dengan memanipulasi data agar data yang ada mempunyai makna sebagaimana yang tergambar dalam permasalahan, mulai dari menelaah dan mengelompokkan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta menganalisanya. Dari hasil yang didapat kemudian penulis mengurut-urutkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data yang diperoleh tersebut dikelompokkan, maka penulis memeriksa dan mengoreksi kembali keabsahan data tersebut dengan menggunakan metode derajat kepercayaan, sebagai berikut:

1. Ketekunan/keajegan peneliti, berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap fenomena yang menonjol, khususnya mengenai kinerja Koperasi “Mina Jaya” dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Banyuanyar.
2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

4. Pengecekan data-data melalui pembandingan antara hasil analisis peneliti dengan data yang sebenarnya.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran (Hasan, 2003). Analisis data deskriptif pada penelitian ini dilakukan pada:

1. Pengumpulan Data, yang terdiri dari :
   a) Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul berkenaan dengan kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses lebih lanjut.
   b) Mengkode data, yaitu data yang terkumpul diberi kode tertentu dan dikelompokkan.
   c) Klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai dengan sumber data masing-masing.
2. Pengelolaan dan penyajian data dilakukan setelah data terkumpul diklasifikasikan dengan beberapa kebutuhan, kemudian dilakukan pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian.
3. Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah maka diambil beberapa alternatif yang terbaik atau dijadikan bahan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan (Hasan, 2003:24).

Oleh karenanya dengan menerapkan metode analisa yang lazim digunakan dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan penelitian, bahwa:

1. Analisis data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin dengan proses pengamatan.
2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan masalah yang diamati, dan menemukan keunikan pola-pola tindakan.
3. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan dengan hubungan antarkategori yang dikembangkan atau dihasilkan dari penyusunan taksonomi tersebut di atas.
4. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap masalah yang berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara.
5. Mengevaluasi proposisi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan.
6. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan upaya: (a) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi, (b) menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti.

Selanjutnya, proses analisis data baik ketika mengumpulkan data maupun setelah selesai pengumpulan dimulai dengan:

1. Reduksi Data

   Proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terdapat dilapangan. Hal ini bertujuan mempertajam, menggolongkan, menyortir, dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian Data

   Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk paling umum yang digunakan adalah teks uraian.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

   Merupakan akhir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data yang diperoleh di lapangan. *(Sanapiah,*

1990:12). Dengan demikian, peneliti aktif selama pengumpulan data, selanjutnya aktif di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana digambarkan Milles dan Huberman.

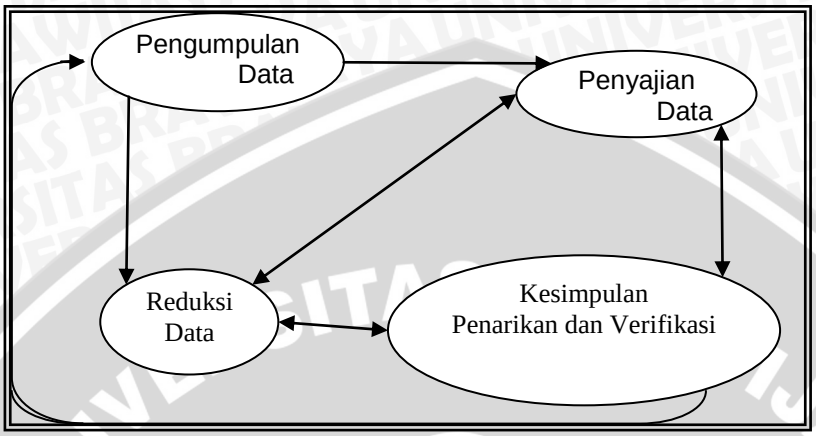

Gambar 3.1 Metode Analisis Data

Sumber: Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI-Press.hlm: 23

Sebelum analisis data dilakukan, maka data yang sedang dan telah dikumpulkan terlebih dahulu disajikan dalam bahasa yang tidak formal, dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli responden, cukup rinci serta tanpa ada interpretasi dari peneliti. Hal ini untuk menjawab tujuan penelitian yang dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Instrumen untuk Menjawab Tujuan Penelitian Nomor 1

Perihal	Isian Program
Visi dan Misi program PEMP	
Perencanaan program PEMP	
Pelaksanaan program PEMP	
Evaluasi program PEMP	

Mengacu pada tabel 3.4 di atas akan diperoleh tujuan penelitian nomor 1 mengenai profil Koperasi “Mina Jaya” dalam PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Tabel 3.5 Instrumen untuk Menjawab Tujuan Penelitian Nomor 2

Perihal	Implementasi
Kinerja program PEMP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	
Kinerja program PEMP dalam menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	
Kinerja program PEMP dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut	
Kinerja program PEMP dalam memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan	
Kinerja program PEMP dalam mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipasif dan transparan	

Mengacu pada tabel 3.5 di atas akan diperoleh tujuan penelitian nomor 2 mengenai implementasi program PEMP melalui Koperasi "Mina Jaya" di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Tabel 3.6 Instrumen untuk Menjawab Tujuan Penelitian Nomor 3

Perihal	Sebelum	Sesudah
Menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat PEMP		
Menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat permodalan dan pengembangan usaha perikanan		
Menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat sarana dan prasarana perikanan		
Menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat pemasaran hasil perikanan		

Mengacu pada tabel 3.6 akan diperoleh tujuan penelitian nomor 3 mengenai evaluasi dampak program PEMP yang diterapkan melalui Koperasi "Mina Jaya"di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Koperasi Perikanan " Mina Jaya "

Perkembangan KPMJ tahun 2013 mengalami kemajuan yang mana ditunjang dengan kinerja pengurus dan karyawan namun demikian pengurus Koperasi "Mina Jaya" tetap menyadari keterbatasan dan kemampuan baik tenaga maupun pikiran untuk membawa KPMJ yang lebih baik dari yang telah dicapai selama ini. Untuk mewujudkan tujuan di atas maka pengurus Koperasi Perikanan Perikanan "Mina Jaya" membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dinas koperasi dan dinas kelautan perikanan peternakan. Penyajian tentang perkembangan KPMJ, antara lain di bidang administrasi, pengelolaan keuangan. Gambaran umum tentang keanggotaan, pengurus, pengawas dan karyawan dapat dilihat pada table 1,2,3 dan 4.

Tabel 4.1 Keanggotaan Koperasi Perikanan "Mina Jaya"

Jumlah Anggota	2011	2012	2013
Anggota penuh	162	161	165

Sumber : Koperasi Perikanan "Mina Jaya" Kabupaten Sampang, 2014.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah anggota yang ada di Koperasi Perikanan "Mina Jaya" mengalami peningkatan, yaitu tahun 2011 berjumlah 162 orang, tahun 2012 berjumlah 161 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 165 orang.

Tabel 4.2 Pegawai Koperasi Perikanan "Mina Jaya"

No	Nama	Jabatan	Tupoksi
1	H. Syafiudin, S.Ag	Ketua	Kordinator Umum
2	M. Triswarno	Sekretaris	KO.ADM.USP Swamitra mina
3	Syamsul Bachri	Bendahara	Kordinator Keuangan

Sumber : Koperasi Perikanan "Mina Jaya" Kabupaten Sampang, 2014.

Mengacu pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa keberadaan pegawai Koperasi Perikanan Perikanan "Mina Jaya" cukup menunjang dalam upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang juga didukung oleh pengawas yang dapat ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Pengawas Koperasi Perikanan “Mina Jaya“

No	Nama	Lama Jabatan
1	M. Rusjadi, Bsc	1 Tahun
2	H. Hakun Abd Mujib	2 Tahun

Sumber: Koperasi Perikanan “Mina Jaya“ Kabupaten Sampang, 2014.

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa keberadaan pengawas memberikan dampak yang baik dalam upaya memonitoring pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang ditunjang oleh adanya karyawan yang dapat ditabulasikan, sebagai berikut.

c. Karyawan

Tabel 4.4 Tugas dan Jabatan Anggota Koperasi Perikanan “Mina Jaya“

No	Nama	Jabatan	Tupoksi
1	M. Irfan, R,SE	Manajer USP	Kordinator
2	Supriyadi	CS	Pembina
3	Bambang, S	Deb. Col	D. Colector, ADM
4	Fitriatul Laili	Teller	ADM.Keuangan
5	M. Zainudin		Pertokoan

Sumber: Koperasi Perikanan “Mina Jaya“ Kabupaten Sampang, 2014.

4.2 Profil PEMP di Koperasi “Mina Jaya”di Kelurahan Banyuanyar

4.2.1 Gambaran Umum PEMP

Program PEMP menjadi pendorong bagi tumbuhkembangnya ekonomi sektor perikanan. Pertama kali Program PEMP diperkenalkan di Kabupaten Sampang pada Tahun 2004 dengan didirikannya koperasi perikanan yang diberi narna Koperasi Perikanan Mina Jaya. Program PEMP saat ini difokuskan pada pengembangan Koperasi yang sudah terbentuk dengan harapan koperasi ini menjadi lebih berkembang dan sehat sehingga kedepan koperasi menjadi tumpuan bagi akses modal bagi masyarakat pesisir. Sampai pada akhir Tahun 2012, koperasi Mina Jaya masih ada satu unit usaha yaitu USP yang difasilitasi

modal dari program PEMP dan bekerjasama dengan Bank Bukopin sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Pedoman PEMP.

Kecenderungaran masyarakat pesisir bahwa ikut menjadi anggota koperasi agar dapat dengan mudah memperoleh pinjaman uang masih sangat dirasakan. Oleh karenanya Pogram PEMP harus dapat meningkatkan pemahaman tentang perkoperasian sehingga tujuan jangka panjang program pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh M. Syamsul Bahri, selaku Pengurus Koperasi dan Wirawasta Kabupaten Sampang, bahwa dengan Pogram PEMP menjadikan para belayan menjadi anggota koperasi agar mereka juga bisa memanfaatkan simpan pinjam dan menjadi bagian dari lembaga ini (wawancara tanggal 2-4-2014).

4.2.2 Tujuan PEMP

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat serta diversifikasi usaha yang berbasis pada sumberdaya lokal (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, 2009, Laporan Akhir PEMP).

A. Tujuan Khusus Program PEMP

1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya lokal / swadaya dalam hal ;
   a. Memilih sendiri jenis usaha berdasarkan pada potensi lokal dan potensi diri dalam masyarakat
   b. Menentukan besaran biaya / pembiayaan terhadap usaha-usaha yang menjadi sasaran program.
   c. Menentukan sistem pengembalian plus jasa lainnya yang timbul dengan musyawarah dan mufakat;
2. Meningkatkan SDM untuk usaha dan produktivitas

3. Mengembangkan usaha yang sudah ada dalam masyarakat agar berkempuan daya saing dngan usaha sejenis di luar daerah.
4. Memperkuat kelembagaan atau kelompok dalam masyarakat pesisir dengan berbagai potensi yang dimiliki termasuk agama, adat dan sosial ekonomi yang sudah melembaga.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan ikut menjaga kelestariannya.

B. Sasaran PEMP

Sasaran program PEMP Tahun 2013 di Kabupaten Sampang adalah masyarakat pesisir skala usaha mikro yang dibagi kedalam 2 tahapan sasaran, yaitu: (1) Koperasi perikanan sebagai sasaran, dan (2) sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan serta pengelolaan wisata bahari, yang berlokasi di 2 (dua) desa yaitu: Kelurahan Banyuanyar dan Desa Pulau Mandangin dalam wilayah Kecamatan Sampang. Disamping itu semua, bilamana masyarakat non perikanan yang tinggal di wilayah tersebut sangat membutuhkan koperasi dalam pengembangan usahanya maka dapat dilibatkan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kelayakan usahanya.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh M. Syamsul Bahri, selaku Pengurus Koperasi dan Wirawasta Kabupaten Sampang, bahwa sesuai dengan visi misi PEMP, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota dan para nelayan pesisir. Memberikan kemudahan pinjaman dan menyarankan tujuan pemberikan pinjaman sesuai denga kondisi perekonomian yang berlaku agar para nelayan bisa lebih maju dan mendapat hasil yang maksimal (wawancara tanggal 2-4-2014).

C. Ruang Lingkup Kegiatan Program PEMP

Memasuki Tahun 2014, sesuai dengan (Pedoman Umum PEMP) dan DIPA PEMPJ Kabupaten Sampang pada tahap / periode mempersiapkan diversifikasi usaha, maka kegiatan pokok program PEMP mencakup pengembangan kapasitas LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang dalam hal ini berbentuk koperasi perikanan, dan Kedai Pesisir; sedangkan kegiatan SPDN yang telah masuk dalam DIPA PEMP 2013 dipertimbangkan kembali pelaksanaannya karena berbagai kendala di lapangan.

Lingkup kegiatan Program PEMP di Kabupaten Sampang sebenarnya bertumpu pada pembangunan manajemen koperasi yang merupakan pengelola lanjutan program PEMP tahun 2006. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dapat mengoptimalkan kinerja koperasi, pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat pesisir yang diwujudkan dalam kegiatan kelompok yang bertujuan pada peningkatan SDM untuk memperkuat ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.

Untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat pesisir khususnya nelayan melalui pemberdayaan (*empowering*). Pemerintah memandang dengan potensi wilayah pesisir yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya. Salah satu program yang bertujuan dan mendukung kearah tersebut adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pertama kali Program PEMP diperkenalkan di Kabupaten Sampang pada Tahun 2004 dengan didirikannya koperasi perikanan yang diberi narna Koperasi Perikanan Mina Jaya. Sampai pada akhir Tahun 2012, koperasi Mina Jaya masih ada satu unit usaha yaitu USP yang difasilitasi modal dari program PEMP dan bekerjasama dengan Bank Bukopin sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Pedoman PEMP.

Melalui program PEMP masyarakat pesisir dengan wadah kelompok mempunyai kebebasan untuk memilih, merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan berkelanjutan. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2004 tentang pedoman umum pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), oleh pemerintah dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kondisi potensi sumber daya, penguasaaan teknologi serta kemampuan berusaha termasuk di dalamnya dukungan moral dalam rangka meningkatkan kondisi sosial dan pendapatan masyarakat di kawasan pesisir, merupakan permasalahan umum yang sering dihadapi oleh masyarakat pesisir.

Dengan demikian Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) bertujuan meningkatkan kemampuan sumberdaya lokal / swadaya, meningkatkan SDM untuk usaha dan produktivitas, mengembangkan usaha yang sudah ada dalam masyarakat agar berkempuan daya saing dengan usaha sejenis di luar daerah, memperkuat kelembagaan atau kelompok dalam masyarakat pesisir dengan berbagai potensi yang dimiliki termasuk agama, adat dan sosial ekonomi yang sudah melembaga dan mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan ikut menjaga kelestariannya.

Melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ini diharapkan dapat dibangun suatu kerangka pendekatan yang komprehensif, holistik dan harmonis dengan memperhartikan sistem nilai, kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, potensi lokal, unit usaha

masyarakat dan daya dukung lingkungan. Dengan langkah ini diharapkan tidak saja akan meningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan pengelolaan sumber daya dan pesisir, tetapi juga akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan kesejahteraan dan sumber daya pesisir dan laut. Sesuai dengan visi misi PEMP, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada seluru anggota dan para nelayan pesisir. Memberikan kemudahan pinjaman dan menyarankan tujuan pemberikan pinjaman sesuai denga kondisi perekonomian yang berlaku agar para nelayan bisa lebih maju dan mendapat hasil yang maksimal.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya meliputi aspek ekonomi (pendapatan) tetapi juga meliputi aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama), lingkungan dan infrastruktur. Pengembangan aspek ekonomi penting untuk meningkatkan IPTEK dan IMTAQ serta sikap dan perilaku. Aspek lingkungan penting untuk kelestarian sumber daya pesisir dan laut serta pemukiman. Aspek infrastrutur dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial. Keempat aspek ini harus ditunjang oleh kelembagaan ekonomi yang kuat dan dikembangkan secara seimbang agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal.

Oleh karena itu, lingkup kegiatan Program PEMP di Kabupaten Sampang sebenarnya bertumpu pada pembangunan manajemen koperasi yang merupakan pengelola lanjutan program PEMP tahun 2006. Oleh karena itu semua kegiatan harus dapat mengoptimalkan kinerja koperasi, pembinaan kelernbagaan kelompok masyarakat pesisir yang diwujudkan dalam kegiatan kelompok yang bertujuan pada peningkatan SDM untuk memperkuat ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan (ekonomi) akan mempengaruhi oleh kegiatan usaha yang dikembangkan dan

permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya laut dan pesisir yang ada., teknologi yang tersedia serta SDM yang akan mengelola kualitas sumber daya yang dicirikan oleh perilaku IMTAQ serta wawasan IPTEK, kondisi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan agama. Hal tersebut penting untuk diperhartikan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi yang meliputi manajemen usaha, kemitraan dan kelembagaan yang dikelolaanya.

Untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi peran pemerintah masih sangat dibutuhkan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah dan, akses modal dan pasar dan tata ruang kawasan pesisir. Keberhasilan program PEMP harus didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumber daya lokal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat dan memperhartikan skala dan tingkat kelayakan ekonomi. Penegembangan organisasi dan kelembagaan sosial eknomi masyarakat yang berbasis pada budaya lokal perlu dilakukan untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi yang yang dikembangkan. Hal ini penting terutama untuk membantu mengantisipasi dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.

4.3 Implementasi Program PEMP melalui Koperasi “Mina Jaya”

4.3.1 Perencanaan Program PEMP melalui Koperasi “Mina Jaya”

Perencanaan PEMP tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun koperasi agar menjadi badan usaha yang sehat, bermanfaat bagi anggota dan anggota dapat secara aktif berpartisipasi. Oleh karena itu dalam jangka panjang program PEMP di Kabupaten sampang tetap diarahkan pada ; a) Peningkatan

kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir; b) Mendorong berdirinya koperasi kopersi perikanan yang baru yang tumbuh dari keinginan dan kebutuhan masyarakat pesisir untuk maju dlam rangka meningkatkan kekuatan ekonominya. Koperasi yang telah dirintis akan menjadi koperasi sekunder di bidang usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Sampang.

Masyarakat pesisir kesulitan dalam mengakses modal karena lembaga-lembaga yang ada sekarang kurang berperan aktif membantu masyarakat pesisir. Penggunaan sistem jaminan dirasakan menyulitkan masyarakat karena mereka kesulitan menyediakan jaminan untuk pengajuan kredit. Manfaat pendirian Koperasi “Mina Jaya” adalah diarahkan untuk mendorong masyarakat pesisir untuk mengembangankan kemitraan dengan kelembagaan swasta dan pemerintah. Diharapkan dengan adanya Program PEMP melalui Koperasi “Mina Jaya” keterbatasan masyarakat pesisir dalam mengakses permodalan dapat diatasi. Kedepannya dengan kemudahan yang diberikan oleh Koperasi “Mina Jaya” untuk masyarakat pesisir memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan, penjualan, pemasaran serta produksi. Oleh karena itu, perhatian terhadap kedudukan dan fungsi lembaga ekonomi sangat penting pada kehidupan masyarakat pesisir.

Di Kabupaten Sampang Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di mulai pada tahun 2004 dan berhasil membentuk sebuah koperasi perikanan yang diberi nama Koperasi “Mina Jaya“ yang berlokasi di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang yang di dalamnya terdapat Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Mina. Pada unit USP ini masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota dapat melakukan simpan pinjam dana untuk keperluan permodalan usahanya. Namun kegiatan ini tidak berhenti cukup sampai disini,

bahkan sampai pada tahun 2013 kegiatan ini masih dalam taraf pemantauan dan pembinaan terutama dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Maksud diadakannya kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) adalah untuk meningkatkan kinerja Lembaga memperluas akses modal kepada masyarakat pesisir, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan tujuan kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, pengembangan penguatan kelembagaan sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Koperasi Perikanan) yang telah berdiri dan berkelanjutan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada tahun 2013, kegiatannya adalah penekanan pada usaha peningkatan kemampuan SDM dari pengurus koperasi perikanan mina jaya agar dapat menjalankan kaidah–kaidah perkoperasian dengan suatu system yang lebih baku dan akurat. Pembinaan diarahkan secara langsung kepada pengurus dan karyawan koperasi terkait persoalan perkoperasian, serta inventarisasi dan pengelompokan data keuangan, mengikhtisarkan data keuangan dari data yang dikelompokkan menjadi buku besar dan mengola data keuangan dari buku besar menjadi neraca dan perhitungan laba rugi. Koperasi Perikanan Mina Jaya berdiri pada tahun 2004, dimana pembentukannya diawali dari kelompok pengajian “Nurul Iman“ dengan badan hukum: 508/21/443.114/2004 di Jl. Diponegoro 70 Sampang.

Unit yang berjalan sampai saat ini di Koperasi Perikanan Mina Jaya adalah Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Kedai Pesisir. USP ini memiliki 179 debitur (anggota) yang telah melakukan transaksi dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat pesisir dengan batas waktu 3 tahun dengan pinjaman

maksimal Rp. 25 juta per anggota. Dari hasil pembinaan diketahui bahwa masih banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mencicil ke USP Koperasi Perikanan Mina Jaya. Hal tersebut diperkirakan karena perekonomian debitur yang rata-rata nelayan dan pengolah ikan pendapatannya menurun seiring dengan menurunnya hasil tangkapan ikan; kekurangtegasan pengurus dan karyawan koperasi untuk melakukan eksekusi atas angsuran debitur yang macet dengan langkah persuasif terlebih dahulu sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara debitur dan koperasi.

Apabila kita lihat prinsip pada program PEMP melalui Koperasi “Mina Jaya” mengharapkan adanya *competitiveness* yang mengharapkan nasabah maupun debitur dapat bersaing secara jujur dalam mengajukan usulan pinjaman kredit kepada Koperasi “Mina Jaya”, sehingga usaha-usaha yang baik dan mampu saja yang bisa mendapatkan kredit. Selain kelompok masyarakat pesisir kelompok-kelompok lain yang tidak berusaha di bidang perikanan juga bisa mengajukan kredit juga memberikan kepada masyarakat golongan lain. Hal ini terlihat bahwa Koperasi “Mina Jaya” memberi kesempatan yang sama kepada kelompok lain agar memperoleh manfaatnya secara langsung, jadi prinsip dalam program PEMP yaiu *Equality* telah dijalankan oleh Koperasi “Mina Jaya”.

4.3.2 Implementasi Program PEMP melalui Koperasi “Mina Jaya”

Implementasi Program PEMP tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun koperasi agar menjadi badan usaha yang sehat, bermanfaat bagi anggota dan anggota dapat secara aktif berpartisipasi. Oleh karena itu dalam jangka panjang program PEMP di Kabupaten sampang tetap diarahkan pada;

1. Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir;

2. Mendorong berdirinya koperasi koperasi perikanan yang baru yang tumbuh dari keinginan dan kebutuhan masyarakat pesisir untuk maju dlam rngka meningkatkan kekuatan ekonominya. Koperasi yang telah dirintis akan menjadi koperasi di bidang usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Sampang.

Lebih lanjut pelaksanaan Program PEMP di Kabupaten Sampang diuraikan sebagai berikut ;

1. Sosialisasi Program

   Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di tingkat kabupaten dan desa sasaran melalui pertemuan-pertemuan resmi, dialog antara petugas lapangan dengan tokoh-tokoh masyarakat pesisir dan melibatkan instansi lain/stakeholders.

2. Fasilitasi / bantuan manajemen kepada daerah dalam rangka pelaksanaan program PEMP dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan;

   - Pendampingan program (Konsultan manajemen)
   - Pendampingan oleh Tenaga Pendamping Desa(TPD)
   - Pemberdayaan perempuan pesisir
   - Penggalangan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir
   - Evaluasi Komprehensip pelaksanaan program PEMP

3. Bantuan kompensasi kenaikan harga BBM

   Yang dimaksud dengan bantuan dalam hal ini adalah dana yang diterimakan kepada koperasi perikanan untut mengembangkan usahanya yang meliputi sebagai berikut;

   - Penjaminan Daerah Ekonomi Produktif (DEP) yang dikerjasamakan dengan lembaga perbankkan
   - Bantuan modal untuk pendirian Unit Usaha pertokoan "Kedai Pesisir”
   - Bantuan modal untuk pendirian Stasiun Bahan Bakar Solar

4. Adibakti Minabahari

Yang merupakan kegiatan penilaian aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh masyerakat pesisir dalam rangka menumbuhkan kemampuan bersaing.

5. Publikasi

Publikasi merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat luas tentang eksistensi program PEMP

4.3.3 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan PEMP adalah tahapan yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaan program.

1. Penjaminan tunai

a. Penggunaan Kredit

Dana Ekonomi Produktif (DEP) yang dijadikan sebagai penjaminan tunai (*cash collateral*) dikelola dengan tahapan sebagai berikut :

1) DEP dibukukan pada rekening giro atas nama koperasi untuk kemudian dijadikan jaminan kepada bank pelaksana. Bank pelaksana memberikan kredit kepada koperasi minimal sebesar DEP yang dijaminkan. Diharapkan, seiring dengan meningkatnya kinerja koperasi melalui USP, bank pelaksana dapat menyalurkan kredit yang bersumber dari dana perbankan sendiri.

2) Kredit dari bank pelaksana dibukukan sebagai modal tidak tetap (MTT) pada unit usaha simpan pinjam untuk diteruskan sebagai pinjaman kepada masyarakat pesisir anggota koperasi atau calon anggota koperasi.

b. Jangka waktu Kredit

1) Jangka waktu kredit dari bank pelaksana kepada koperasi maksimal tiga tahun sesuai dengan pedoman umum PEMP 2006.

2) Jangka waktu pinjaman kepada masyarakat pesisir anggota dan calon anggota koperasi disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha yang dibiayai. Yang telah dilakukan oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya adalah memberikan kredit paling lama selama tiga tahun dan sampai saat ini belum diadakan perubahan aturan, disamping itu juga dipasarkan program kredit jangka pendek untuk masa 3 bulan untuk usaha-usaha yang sangat produktif terutama untuk pembiayaan kegiatan perdagangan yang antara lain (perdagangan ikan segar perdagangan ikan kering bhan pakan ternak / bahan tepung ikan).

c. Suku Bunga Kredit

1) Tingkat suku bunga pinjaman dari bank pelaksana kepada koperasi sebesar 6 % efektif per tahun
2) Bunga dan pokok pinjaman dibayar secara rutin setiap bulan. Kewajiban bunga pinjaman selama 6 (enam) bulan pada tahun pertama dicadangkan, sedangkan pokok pinjaman mulai diangsur pada bulan ke tujuh tahun pertama.
3) Bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota dan calon anggota koperasi sebesar 18 % (Flat) dengan jangka waktu ditentukan selama-lamanya tiga tahun. Dan jangka pendek dengan beban jasa 2% selama tiga bulan dengan bunga dipotong langsung pada saat pencairan kredit.

d. Sanksi

1) Apabila koperasi menunggak kewajiban pelunasan kredit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka bank pelaksana berhak mencairkan DEP atas nama koperasi yang dijadikan sebagai jaminan untuk digunakan sebagai pelunasan kredit.

2) Apabila koperasi telah menunggak kewajibannya dan bank pelaksana telah mencairkan DEP yang dijadikan sebagai jaminan, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi koperasi untuk tidak mendapatkan alokasi DEP pada program PEMP tahun berikutnya maupun yang bersumber dari bank pelaksana lainnya.

4.3.4 Mekanisme Penyaluran DEP

Seperti yang kita ketahui kemiskinan pada masyarakat pesisir bukan hanya terjadi karena akses permodalan yang kurang, tetapi permasalahan yang bersifat teknis juga menjadi masalah. Seperti contoh kemampuan kita memasarkan produk dengan harga yang menguntungkan masih lemah, yang berakibat sumber pendapatan nelayan menjadi kurang karena tidak memiliki sarana pemasaran yang baik. Selain itu juga efek sampingnya ketika pendapatan nelayan kurang mereka terpaksa menghutang di sana–sini yang berakibat juga terhadap pengelolaan keuangan mereka.

Penyaluran Dana Ekonomi Produktif ini biasanya disesuaikan dengan potensi lingkungan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengurus atau anggota koperasi. Wilayah dengan potensi perikanan seperti di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang menunjukkan adanya korelasi dengan kegiatan ekonomi produktif yang ditekuni oleh atau anggota koperasi Perikanan “Mina Jaya”.

1. Yang dilakukan Koperasi;
   a. Koperasi mengajukan proposal pencairan DEP ke KPA.PEMP Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sampang.
   b. Koperasi membuka rekening pada Bank Bukopin yang telah menjadi mitra koperasi sejak Tahun 2004

2. Yang Dilakukan KPA PEMP;

a. Mengajukan pencairan dana ke KPPN Pamekasan berdasarkan ketentuan surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan dan dilampiri dengan:

1) Surat perjanjian pemberian dana antara KPA dengan ketua koperasi yang diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang.

2) Surat Keputusan Dinas Kelautan Dan Perikanan tentang penetapan koperasi sebagai pelaksana penyaluran modal dengan pola hibah yang dijaminkan.

3) Surat peryataan koperasi tentang kesediaan menjaminkan DEP. Kuitansi tanda terima (KPA kepada koperasi)

3. KPPN daerah Pamekasan mencairkan DEP dan menstransfer langsung ke rekening koperasi pada bank Bukopin sebagai bank pelaksana.

4. Setelah koperasi melengkapi persyaratan dan telah menandatangani seluruh dokumen yang dipersyaratkan, maka bank pelaksana dapat melakukan pengikatan kredit selama jangka waktu 3 tahun untuk program penyaluran DEP yang dijaminkan, dan selanjutnya bank pelaksana dapat mencairkan pinjaman tersebut kepada koperasi untuk segera dibukukan sebagai pinjaman di unit usaha simpan pinjam.

5. Koperasi menyalurkan kredit dari bank pelaksana ke USP untuk disalurkan kepada masyarakat pesisir.

6. USP menyalurkan pinjaman kepada masyarakat pesisir.

Dari hasil pembinaan diketahui bahwa masih banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mencicil ke USP koperasi perikanan mina jaya. Hal tersebut diperkirakan karena perekonomian debitur yang rata-rata nelayan dan pengolah ikan pendapatannya menurun seiring dengan menurunnya hasil

tangkapan ikan; kekurangtegasan pengurus dan karyawan koperasi untuk melakukan eksekusi atas angsuran debitur yang macet dengan langkah persuasif terlebih dahulu sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara debitur dan koperasi.

4.3.5 Pengembangan Usaha Ekonomi

Perkembangan usaha ekonomi adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha di lakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.

A. Kerjasama Dalam Pendampingan Program

Konsultan Manajemen Kabupaten (KM) dalam Program PEMP di Kabupaten Sampang Tahun 2013 adalah Lembaga Perguruan Tinggl Universitas Brawijaya (Research Center For Conflic and Politic RCCP- FIA Unibraw) Malang. Lembaga ini diberi tugas untuk menata strategy dan menajerial lembaga koperasi perikanan sebagai penerima Program PEMP yang telah difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2004. Karena berdasarkan evaluasi, pelaksanaan program PEMP memerlukan kerja keras untuk dapat mewujudkan kinerja yang seperti yang diharapkan tersebut, maka pedoman umum PEMP harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pendampingan di daerah.

Kegiatan pendampingan program lebih mengutamakan pembinaan koperasi agar lebih profesional dan mandiri. Dengan demikian koperasi yang telah disiapkan menjadi pusat pengembangan atau rujukan model pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diwujudkan. Salah satu kegiatan pendampingan program adalah *Focus Discussion Group* (FGD) yang diharapkan menjadi model pembelajaran secara langsung kepada; pengurus, karyawan dan

perwakilan anggota. Perwakilan anggota dipilih berdasarkan usulan kelompok atau anggota yang mempunyai pengaruh kuat kepada anggota lainnya. Dengan demikian pembelajaran dan pemahaman perkoperasian dapat dilakukan melalui getok tular tanpa harus dilakukan dengan mengundang seluruh anggota.

B. Kerjasama Dalam Pendampingan Tenaga Pendamping Desa (TPD)

TPD merupakan tenaga profesional di bidang yang bersedia tinggal di tengah masyarakat sasaran dan bertugas mendampingi masyrakat secara terus-menerus (selama program berlangsung) dalam bentuk mempersiapkan masyarakat pesisir untuk mengakses kredit pada LKM; mendampingi mereka menjalankan dan mengembangkan usaha baik dalam proses produksi maupun pemasaran; membuat laporan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada dinas kelautan dan perikanan.

TPD diutamakan yang berkualifikasi pendidikan minimal D3 dalam bidang terkait dan berasal dari daerah setempat. untuk jangka panjang TPD diharapkan berintegrasi kedalam koperasi. Pada tahun ini 2 orang TPD yang dibutuhkan, satu diantaranya berasal dari Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta yang direkrut secara khusus melalui kerjasama Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan STP. Dan satu orang direkrut dari daerah setempat.

4.4 Dampak PEMP terhadap Kemandirian Ekonomi

Sasaran program PEMP adalah koperasi, dimana koperasi perikanan yang sudah melaksanakan program PEMP tahun sebelumnya (sejak Tahun 2004) masih belum betul-betul dapat dipacu untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan mandiri. Ditinjau dari legalitas dan sistem administrasinya telah sesuai dengan standard akuntasi secara umum yang dibuktikan dengan hasil audit dari Auditor Independen Santosa (Register Akuntan Nomor: D-2270, Lisensi Akuntan Publik nomor: 98.1.030a) yang dituangkan dalam laporan tanggal 18 Mei Tahun 2006, namun dilihat dari sisi hasil usaha

masih jauh dari harapan. Keadaan tersebut diakibatkan antara lain sebagai berikut;

1. Sistem kemitraan dengan Bank pelaksana menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
2. Debitor yahg notabene masyarakat pesisir masih belum sepenuhnya berperan aktif dalam pengembaliannya;
3. Unit pengelola USP masih belum memenuhi standarisasi profesional, SDM masih sangat perlu ditingkatkan kemampuannya;
4. Latar belakang SDM pengurus koperasi yang beragam kemampuannya dan masih perlu meningkatkan kemampuannya.

Masyarakat pesisir mempunyai keberagaman latar sosial dan kemampuan ekonominya. Program PEMP tidak mungkin dapat menjangkau sepenuhnya membantu / meringankan kebutuhan modal bagi masyarakat pesisir yang membutuhkan modal usaha. Disisi lain kalangan masyarakat kecil sangat mendambakan dana murah. Hal ini tentu sulit dipenuhi karena ekonomi biaya tinggi (seperti disebutkan pada uraian di atas). Oleh karena itu program PEMP dengan peluncuran dana DEP belum dapat meningkatkan kemampuan usaha ekonomi masyarakat pesisir secara signifikan.

Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan akan dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukung.nya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan oleh kondisi sumber daya laut dan pesisir yang ada, teknologi yang tersedia, serta kualitas SDM yang akan mengelolanya kualitas sumberdaya manusia, kondisinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan agama. Hal tersebut penting untuk diperhartikan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi meliputi manajemen usaha, kemitraan dan kelembagaan yang dikelolanya.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh M. Syamsul Bahri, selaku Pengurus Koperasi dan Wirawasta Kabupaten Sampang, bahwa upaya terus dilakukan peningkatan kemandirian masyarakat pesisir malalui pengembangan ekonomi, peningkatan SDM, partisipasi masyarakat, pengeluaran modal, dan pengeluaran kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan SD Pesisir dan laut.

Wilayah pesisir adalah wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup besar bila dimanfaatkan dengan baik akan dapat mensejahterakan bagi penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Berangkat dari hal tersebut maka pemerintah melalui Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sampang mengarahkan program ini untuk tetap pada lokasi sasaran PEMP. Dengan mencoba memperbaikinya dalam hal-hal yang masih harus didukung. Pemerintah saat ini melalui dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan beberapa penambahan kegiatan yang mecakup pada masalah pemberdayaan segenap potensi didalam masyarakat pesisir salah satunya melalui pelibatan lembaga keagamaan. Maka untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program PEMP dan tahun-tahun yang akan datang, maka dipandang perlu diadakan sosialisasi secara utuh yang melibatkan seluruh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan masukan dan evalusasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja program ini dan kegiatan serupa lainnya.

Pada Program PEMP diinisiasi untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran Dana Ekonomi Produktif (DEP). Pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya manusia khususnya sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan sebijaksana mungkin agar

pemanfaatannya dapat berjangka panjang, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap kondisi-kondisi, untuk itu peran serta atau partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk tahun sekarang dan seterusnya.

Berdirinya Koperasi Perikanan Mina Jaya Sampang merupakan media baru bagi pemasyarakatan Program PEMP, selain usaha simpan Pinjam (Swa Mitra Mina), Koperasi mengupayakan usaha Pertokoan, Pabrik ES, Kedai Pesisir. Oleh sebab itu harus diupayakan untuk dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa kegiatan Sosialisasi program PEMP dilakukan adalah publikasi di media cetak, publikasi di media elektronik, iklan layanan masyarakat, pencetakan buletin PEMP dan lokakarya serta adibakti mina bahari.

Karena saat ini pada pelaksanaannya program PEMP masih belum membantu mereka. Pendapatan mereka masih jauh dari harapan mereka, hal ini disebabkan kegiatan-kegiatan program PEMP kurang berperan aktif. Koperasi yang seharusnya memberikan penegetahuan dan keterampilan biasanya hanya memberi kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengikutinya dan seperti yang kita ketahui jumlah anggota koperasi jauh dari jumlah keseluruhan masyarakat pesisir di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Dengan demikian pengembangan koperasi ini sebenarnya juga menjadi tujuan dari program PEMP itu sendiri melalui peningkatan kemandirian masyarakat yang dilakukan melalui sarana unit-unit usaha dari koperasi. Pengembangan koperasi ini diharapakan dapat menghimpun dan dikembangkan potensi dari kreasi, tanggung jawab kolektif, prinsip swadaya dan sumber daya yang dimiliki masyarakat pesisir. Pengembangan kelembagaan pada koperasi ini yang perlu ditingkatkan adalah sumberdaya manusia terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian dan kordinasi. Kekuatan kelembagaan sudah disahkan sebagai sebuah lembaga yang memiliki

peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program seperti pembinaan dan pengawasan yang diterapkan dalam program PEMP.

Karena pada dasarnya masyarakat pesisir di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mempunyai keberagaman latar sosial dan kemampuan ekonominya. Program PEMP tidak mungkin dapat menjangkau sepenuhnya membantu/meringankan kebutuhan modal bagi masyarakat pesisir yang membutuhkan modal usaha. Disisi lain kalangan masyarakat kecil sangat mendambakan dana murah. Hal ini tentu sulit dipenuhi karena ekonomi biaya tinggi (seperti disebutkan pada uraian di atas). Oleh karena itu program PEMP dengan peluncuran dana DEP belum dapat meningkatkan kemampuan usaha ekonomi masyarakat pesisir secara signifikan. Upaya terus dilakukan peningkatan kemandirian masyarakat pesisir malalui pengembangan ekonomi, peningkatan SDM, partisipasi masyarakat, pengeluaran modal, dan pengeluaran kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan SD Pesisir dan laut.

Maka untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program PEMP dan tahun-tahun yang akan datang, maka dipandang perlu diadakan sosialisasi secara utuh yang melibatkan seluruh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan masukan dan evalusasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja program ini dan kegiatan serupa lainnya. Pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya manusia khususnya sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan sebijaksana mungkin agar pemanfaatannya dapat berjangka Panjang, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap kondisi-kondisi, untuk itu peran serta atau partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk tahun sekarang dan seterusnya.

Secara ringkas formulasi dan implementasi program PEMP dapat disajikan pada table 4.5.

Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Penelitian tentang Implementasi PEMP

Perihal	Hasil Penelitian
Visi dan Misi program PEMP	- Menjadikan sumber daya pesisir dan Pulau Kecil sebagai sumber penghidupan yang lestari. - Mendorong pembangunan ekonomi diwilayah pesisr secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi.
Perencanaan program PEMP	- Program PEMP saat ini difokuskan pada pengembangan Koperasi yang sudah terbentuk dengan harapan koperasi ini menjadi lebih berkembang dan sehat sehingga kedepan koperasi menjadi tumpuan bagi akses modal bagi masyarakat pesisir. - Memilih sendiri jenis usaha berdasarkan pada potensi lokal dan potensi diri dalam masyarakat - Menentukan besaran biaya / pembiayaan terhadap usaha-usaha yang menjadi sasaran program. - Menentukan sistem pengembalian plus jasa lainnya yang timbul dengan musyawarah dan mufakat.
Pelaksanaan program PEMP	- Berupaya meningkatkan pemahaman tentang perkoperasian sehingga tujuan jangka panjang program pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan. - membentuk sebuah koperasi perikanan yang diberi nama Koperasi “Mina Jaya“ yang berlokasi di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang yang di dalamnya terdapat Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Mina. - Meningkatkan kemampuan SDM dari pengurus koperasi perikanan mina jaya agar dapat menjalankan kaidah–kaidah perkoperasian dengan suatu system yang lebih baku dan akurat. - Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di tingkat kabupaten dan desa sasaran melalui pertemuan-pertemuan resmi,

	dialog antara petugas lapangan dengan tokoh-tokoh masyarakat pesisir dan melibatkan instansi lain/stakeholders. - Fasilitasi manajemen kepada daerah dalam rangka pelaksanaan program PEMP dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan - Bantuan kompensasi kenaikan harga BBM adalah dana yang diterimakan kepada koperasi perikanan untut mengembangkan usahanya - Adibakti Minabahari yang merupakan kegiatan penilaian aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh masyerakat pesisir dalam rangka menumbuhkan kemampuan bersaing - Publikasi merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat luas tentang eksistensi program PEMP
Evaluasi program PEMP	- Sistem kemitraan dengan Bank pelaksana menimbulkan ekonomi biaya tinggi; - Debitor yahg notabene masyarakat pesisir masih belum sepenuhnya berperan aktif dalam pengembaliannya; - Unit pengelola USP masih belum memenuhi standarisasi profesional, SDM masih sangat perlu ditingkatkan kemampuannya; - Latar belakang SDM pengurus koperasi yang beragam kemampuannya dan masih perlu meningkatkan kemampuannya. - saat ini pada pelaksanaannya program PEMP masih belum membantu mereka. Pendapatan mereka masih jauh dari harapan mereka, hal ini disebabkan kegiatan-kegiatan program PEMP kurang berperan aktif.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 4.6 Kinerja Program PEMP

Perihal	Implementasi
Kinerja program PEMP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	- Pengembangan kapasitas LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berbentuk koperasi perikanan, dan Kedai Pesisir - mengoptimalkan kinerja koperasi, pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat pesisir yang diwujudkan dalam kegiatan kelompok yang bertujuan pada peningkatan SDM untuk memperkuat ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. - Memberikan kebebasan untuk memilih, merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan berkelanjutan.
Kinerja program PEMP dalam menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah dan, akses modal dan pasar dan tata ruang kawasan pesisir. - Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir; - Mendorong berdirinya koperasi kopersi perikanan yang baru yang tumbuh dari keinginan dan kebutuhan masyarakat pesisir untuk maju dlam rngka meningkatkan kekuatan ekonominya. Koperasi yang telah dirintis akan menjadi koperasi sekunder di bidang usaha kelautan dan perikanan.
Kinerja program PEMP dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut	- Mendorong masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan serta pengelolaan wisata bahari - Melakukan pendekatan komprehensif, holistik dan harmonis dengan memperhartikan sistem nilai,

	kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, potensi lokal, unit usaha masyarakat dan daya dukung lingkungan.
Kinerja program PEMP dalam memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan	- Memberikan pinjaman modal kepada masyarakat pesisir dengan batas waktu 3 tahun dengan pinjaman maksimal Rp. 25 juta per anggota. - memberi kesempatan yang sama kepada kelompok lain agar memperoleh manfaatnya secara langsung, jadi prinsip dalam program PEMP yaiu *Equality* telah dijalankan oleh Koperasi "Mina Jaya"
Kinerja program PEMP dalam mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipasif dan transparan	- Sosialisasi secara utuh yang melibatkan seluruh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan masukan dan evalusasi yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki kinerja program ini dan kegiatan serupa lainnya. - Identifikasi terhadap kondisi-kondisi, untuk itu peran serta atau partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk tahun sekarang dan seterusnya

Berbagai program PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Berikut ini adalah dampak dari program PEMP.

Tabel 4.7 Dampak Program PEMP

Perihal	Sebelum	Sesudah
Menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat PEMP	koperasi Mina Jaya belum memiliki USP	Koperasi Mina Jaya masih ada satu unit usaha yaitu USP yang difasilitasi modal dari program PEMP dan bekerjasama dengan Bank Bukopin sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Pedoman PEMP
Menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat permodalan dan pengembangan usaha perikanan	Anggota koperasi masih kesulitan memperoleh pinjaman uang masih sangat dirasakan.	Pogram PEMP menjadikan para belayan menjadi anggota koperasi agar mereka juga bisa memanfaatkan simpan pinjam dan menjadi bagian dari lembaga ini
Menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat sarana dan prasarana perikanan	Keberadaan koperasi masih kurang mendukung terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan	Dengan adanya Program PEMP melalui Koperasi "Mina Jaya" keterbatasan masyarakat pesisir dalam mengakses permodalan dapat diatasi.

Menjadikan Koperasi “Mina Jaya” sebagai pusat pemasaran hasil perikanan	Keberadaan koperasi masih belum maksimal menjadi pusat pemasaran hasil perikanan	Koperasi “Mina Jaya” untuk masyarakat pesisir memberikan perubahan dalam: - Pengelolaan keuangan, merupakan bagian dari manajemen koperasi yang penyelenggaraannya diawasi oleh pengawas, Pembina dan anggota. Manajemen Keuangan koperasi bisa disebut juga sebagai aktivitas pencarian modal menguntungkan dan penggunaan modal secara efektif dan efisien namun tetap berdasarkan prinsip ekonomi dan prinsip koperasi. - Penjualan, adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. - Pemasaran, dimana anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya - Produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Oleh karena itu, perhatian terhadap kedudukan dan fungsi lembaga ekonomi sangat penting pada kehidupan masyarakat pesisir.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Kinerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) (Studi di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang) dapat disimpulkan bahwa:

1. Sampai pada akhir Tahun 2012, koperasi Mina Jaya masih terdapat satu unit usaha yaitu USP yang difasilitasi modal dari program PEMP dan bekerjasama dengan Bank Bukopin sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Pedoman PEMP. Oleh karenanya Pogram PEMP harus dapat meningkatkan pemahaman tentang perkoperasian sehingga tujuan jangka panjang program pemberdayaan masyarakat benar-benar dapat diwujudkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh M. Syamsul Bahri, selaku Pengurus Koperasi dan Wirawasta Kabupaten Sampang, bahwa dengan Pogram PEMP melalui Koperasi Perikanan Mina Jaya menjadikan para nelayan di Kelurahan Banyuanyar menjadi bisa memanfaatkan simpan pinjam.
2. Implementasi Program PEMP melalui Koperasi Mina Jaya tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun koperasi agar menjadi badan usaha yang sehat, bermanfaat bagi anggota dan anggota dapat secara aktif berpartisipasi. Pelaksanaan Program PEMP dilakukan dengan sosialisasi program, Fasilitasi / bantuan manajemen kepada daerah dalam rangka pelaksanaan program PEMP dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan, bantuan kompensasi kenaikan harga BBM, Adibakti Minabahari dan Publikasi. Hal ini diwujudkan dengan Koperasi mengajukan proposal pencairan DEP ke KPA.PEMP Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sampang, Koperasi membuka rekening pada Bank Bukopin yang telah menjadi mitra koperasi sejak Tahun 2004. Oleh karena itu dalam jangka

panjang program PEMP di Kabupaten sampang tetap diarahkan pada; a) Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir; b) Mendorong berdirinya koperasi perikanan yang baru tumbuh dari keinginan masyarakat pesisir untuk maju dalam rangka meningkatkan kekuatan ekonominya. Koperasi yang telah dirintis akan menjadi koperasi sekunder di bidang usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Sampang.

3. Evaluasi dampak PEMP di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, antara lain sosialisasi dan dana dirasakan kurang mendukung pelaksanaan program. Kegiatan sosialisasi selama ini tidak memberikan informasi sehingga masyarakat kurang memahami program. Pendanaan program yang selama ini berasal dari pemerintah masih jauh dari harapan. Sedangkan sumber daya manusia pelaksana program PEMP sudah sesuai karena merupakan orang-orang sekitar dan sudah paham kondisi wilayahnya. Namun dilihat dari sisi hasil usaha masih jauh dari harapan. Keadaan tersebut diakibatkan antara lain, sistem kemitraan dengan Bank pelaksana menimbulkan ekonomi biaya tinggi; Debitor yahg notabene masyarakat pesisir masih belum sepenuhnya berperan aktif dalam pengembaliannya; pengelola USP masih belum memenuhi standarisasi profesional, SDM masih perlu ditingkatkan kemampuannya.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Program PEMP khususnya di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang harus didukung oleh semua pihak yang berkompeten. Karena program PEMP merupakan program yang tidak

dapat dilaksanakan sendirian oleh dinas kelautan dan perikanan, melainkan harus bekerjasama dengan instansi lain (dinas koperasi, dinas perdagangan dan perindustrian) disamping pejabat yang berwenang dan tokoh masyarakat di lingkup kabupaten. Pelaksanaarn program PEMP dituntut meningkatkan koordinasi antar lembaga. Namun "Koordinasi ' mudah diucapkan tetapi melaksanakannya butuh kesabaran dan ketabahan.

2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, hendaknya dipermudah persyaratan menjadi anggota koperasi untuk menjangkau masyarakat yang kurang mampu.
3. Hendaknya koperasi dapat mengadakan pelatihan dan seminar untuk kepentingan koperasi.
4. Diharapkan dengan peningkatan keterampilan masyarakat akan juga memberikan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir sehingga pemberdayaan yang diharapkan program PEMP dapat dicapai.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Azwar, *S.* 2007. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Charles, A. T., 2001. *Sustainable Fishery System*. Blackwell Science Ltd, London

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2005. *Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir* (PEMP).

Elfindri. 2002. *Ekonomi Patron-klien. Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan* **.** Gramedia *Pustaka* Utama. Jakarta

Faisal, Sanapiah, 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh

Hasan, Muhammad tholchah, dkk. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang. Malang

Igit Suyanto, 2005. *Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang*. Skripsi tidak dipublikasikan

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Cides: Jakarta

Koperasi Perikanan “Mina Jaya“ Kabupaten Sampang, 2014

Kusumastanto, T dan Muhammad Karim, 2000. *Skenario Investasi Tambak Udang*. Majalah Komoditas. No.27 Tahun II Tanggal 18 - 1 November.

Kusnadi, 2000, *Nelayan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Komunitas*: Makalah disampaikan dalam Kuliah Tamu

_____ 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. LKIS Yogyakarta

_____, 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta

Marzuki, 2005, *Metodologi Riset,* Ekonisia, Yogyakarta.

Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI-Press

Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S (Ed). 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi.* CSIS.: Jakarta

Sonhaji, 1994, *Teknik Pengumpulan dan Analisis data dalam Penelitian Kualitatif*, Malang: Kalimasada

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Suyanto, Igit. 2005. Studi *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP)*. Semarang : Tim DKP Kota Semarang

Nikijuluw Victor, 2001. *Pemberdayaan Perikanan Rakyat Berdasarkan Analisis Rentabilitas Sumberdaya Di Perairan Laut Jawa*. Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan: prosiding, Bogor

Wrihatnolo, dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Gramedia: Jakarta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Kabupaten Sampang

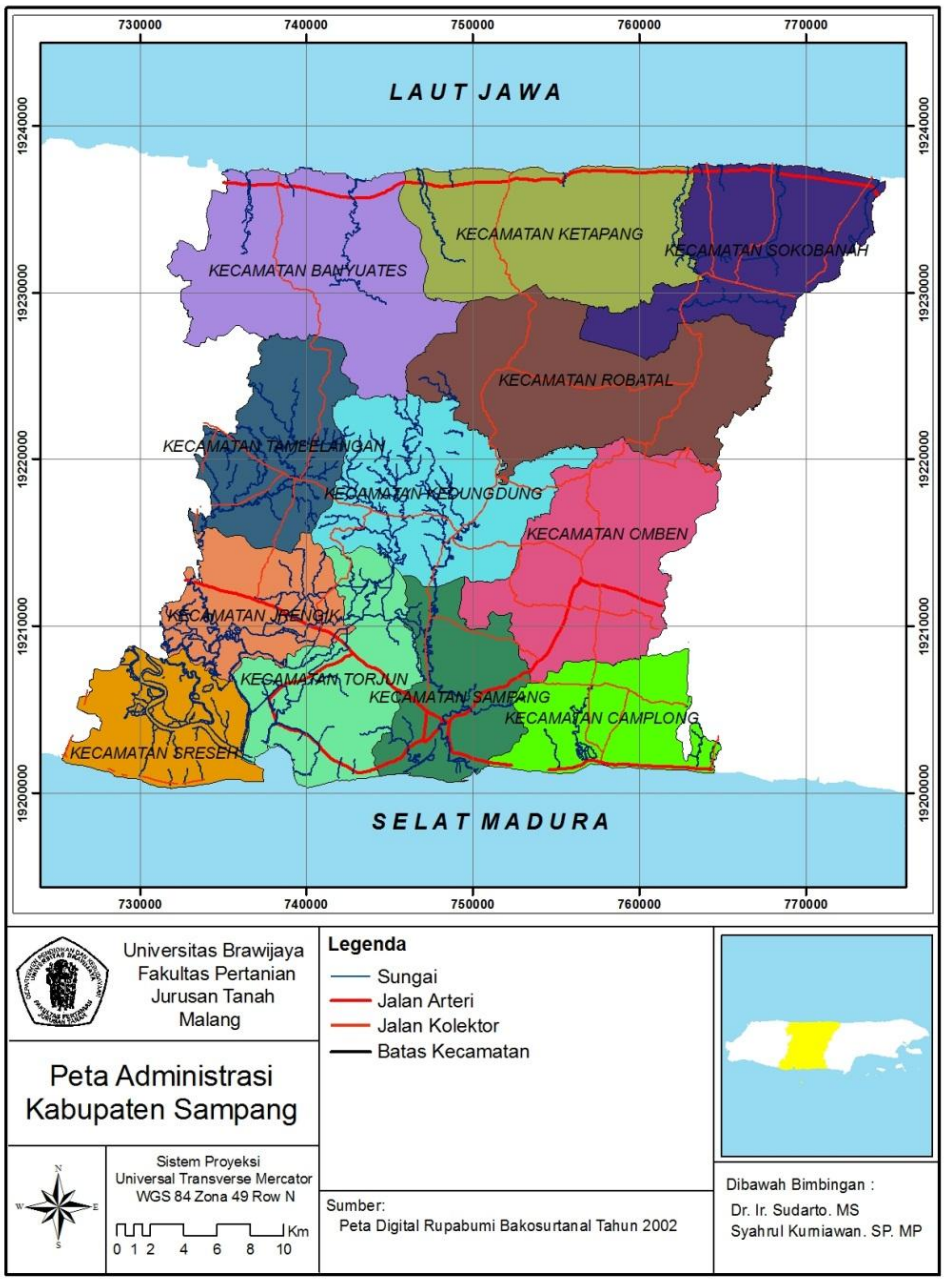

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) melalui Koperasi "Mina Jaya" di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Nama : .....

Umur : ..... tahun

Jenis Kelamin :.....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

1. Profil PEMP

a. Bagaimana Visi dan Misi program PEMP di Kelurahan Banyuanyar?

b. Bagaimana perencanaan program PEMP di Kelurahan Banyuanyar?

c. Seperti apa pelaksanaan program PEMP di Kelurahan Banyuanyar?

d. Bagaimana evaluasi program PEMP di Kelurahan Banyuanyar?

2. Implementasi program PEMP melalui Koperasi "Mina Jaya"

a. Bagaimana kinerja program PEMP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

b. Bagaimana kinerja program PEMP dalam menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha?

c. Bagaimana kinerja program PEMP dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut?

d. Bagaimana kinerja program PEMP dalam memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan?

e. Bagaimana kinerja program PEMP dalam mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipasif dan transparan?

3. Evaluasi dampak program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang diterapkan melalui Koperasi "Mina Jaya"

a. Sejauhmana masyarakat Kelurahan Banyuanyar menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat PEMP?

b. Sejauhmana masyarakat Kelurahan Banyuanyar menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat permodalan dan pengembangan usaha perikanan?

c. Sejauhmana masyarakat Kelurahan Banyuanyar menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat sarana dan prasarana perikanan?

d. Sejauhmana masyarakat Kelurahan Banyuanyar menjadikan Koperasi "Mina Jaya" sebagai pusat pemasaran hasil perikanan?

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA